



LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN

TAHUN 2024
Kabupaten Flores Timur



Disusun Oleh:

Bagian Organisasi

KANTOR

KORRES - TIMUR



Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan lain-lain.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintahan

Daerah Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*, dan *Clean Government*.

Larantuka, **23** Februari 2025



BUPATI FLORES TIMUR,

SULASTRI. H.I. RASYID, S.Pi, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Ile Lewotolok, No. : - Telp. (0383) 21091 Fx. (0383) 21091
L A R A N T U K A

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Larantuka, 11 Maret 2025
Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur, *[Signature]*
[Circular Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR INSPEKTORAT DAERAH]
Antonius Lebi Raya, S.Sos., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19651023 199503 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 memiliki 4 (empat) Tujuan, 11 (sebelas) sasaran strategis dengan total 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja, dan 23 (dua puluh tiga) target kinerja yang harus dicapai. Dari hasil pengukuran realisasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 Indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 Indikator;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 12 Indikator: dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 Indikator.

Rincian Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

NO	TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%)	SKALA ORDINAL
Tujuan I : Terwujudnya daya saing daerah			
Terdapat 1 Indikator Tujuan dan 5 Indikator Sasaran			
1.	Terwujudnya daya saing daerah	58,35	CUKUP BAIK
1.1	Terwujudnya daya saing Ekonomi	408,39	BAIK SEKALI
1.2	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	252,72	BAIK SEKALI
Rata-rata Tujuan I		119,91	BAIK SEKALI
Tujuan II : Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan			
Terdapat 1 Indikator Tujuan dan 2 Indikator Sasaran			
1.	Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	91,99	BAIK SEKALI
1.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	83,64	BAIK

1.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	103,97	BAIK SEKALI
Rata-rata Tujuan II		93,20	BAIK SEKALI
Tujuan III : Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
Terdapat 1 Indikator Tujuan dan 7 Indikator Sasaran			
1	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas		
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	101.36	BAIK SEKALI
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	189.25	BAIK SEKALI
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100.47	BAIK SEKALI
4	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	73.33	CUKUP BAIK
5	Menurunnya Pengangguran	112.69	BAIK SEKALI
6.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	98.72	BAIK SEKALI
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	100.63	BAIK SEKALI
Rata- rata Tujuan III		97,06	BAIK SEKALI
Tujuan IV : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Terdapat 1 Indikator Tujuan dan 5 Indikator dari 2 Sasaran			
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	97.08	BAIK SEKALI
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	294.65	BAIK SEKALI
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100	BAIK SEKALI
Rata-rata Tujuan IV		81,36	BAIK
Rata-rata Tujuan I – IV		98,58	BAIK SEKALI

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp 1,289,484,174,191.48,- atau 99.72 % dari total pagu anggaran sebesar 1,293,111,583,277.41,- .

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	Vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur	2
1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	16
1.4 Sistematika	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Kabupaten Flores Timur	21
2.2 Starategi pembangunan	25
2.3 Arah Kebijakan	28
2.4 Rencana Stategis dan program kegiatan	33
2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
2.6 Perjanjian Kinerja (PK)	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran capaian kinerja	65
3.2 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur	113
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	116
LAMPIRAN	
1. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Tahun 2023	
2. SOP Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur	

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1	Peta Wilayah Kabupaten Flores Tahun 2015	2
1.2	Indek Pembangunan Manusia NTT Tahun 2019 – 2023	11
3.1	Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 60,10 dengan kategori B “Baik”	112
3.2	Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Laporan Keuangan Pemerintah /RKPD Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023	112

DAFTAR TABEL

		Halaman
1.1	Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024	3
1.2	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2023	4
1.3	Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	5
1.4	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin, 2023	6
1.5	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2023	7
1.6	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	8
1.7	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023	9
1.8	Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	15
1.9	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2024	15
1.10	Data Jabatan Sturktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong	15
2.1	Srategi Pembangunan pada tujuan dan sasaran RPD Kabpuaten Flores Timur tahun 2023-2026	26
2.2	Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing strategi pembangunan kabupaten flores timur tahun 2023-2026	29
2.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Baerdasarkan RPD	34
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur	45
2.4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Flores Timur	57
3.1	Skala Pengukuran Ordinal	66
3.2	Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2024	67
3.3	Tujuan 1 Terwujudnya daya saing ekonomi	69
3.4	Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) tahun 2021 s.d 2024	71
3.5	Sasaran Strategi 1.1 Terwujudnya daya saing Ekonomi	71
3.6	Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) tahun 2022 s.d 2024	72
3.7	Perbandingan realisasi Laju Inflasi Daerah (Point) tahun 2022 s.d 2024	73
3.8	Progres Indeks Desa Membangun	76

3.9	Perbandingan realisasi Indeks Nilai Investasi Daerah tahun 2022 s.d 2024	77
3.10	Tujuan 1 Terwujudnya Daya Saing Daerah Sasaran Strategi 1.2 Terwujudnya daya saing Infrastruktur	77
3.11	Perbandingan realisasi Indeks Infrastruktur (Point) Tahun 2022 s.d 2024	79
3.12	Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	79
3.13	Perbandingan realisasi Indeks Gini (Point) tahun 2021 s.d 2023	81
3.14	Sasaran Strategi 2.1 Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	81
3.15	Perbandingan realisasi Tingkat Kemiskinan tahun 2022 s.d 2024	83
3.16	Sasaran Strategi 2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	83
3.17	Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 s/d 2024	84
3.18	Target dan Capaian Nilai Komposit Pendukung pelaksanaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	86
3.19	Tujuan 3 Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas	87
3.20	Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d 2024	88
3.21	Sasaran Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	88
3.22	Perbandingan realisasi Rata-rata lama sekolah tahun 2022 s.d 2024	89
3.23	Perbandingan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 s.d 2024	90
3.24	Perbandingan realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 s.d 2024	92
3.25	Sasaran Strategi 3.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	92
3.26	Perbandingan realisasi Angka Kelahiran Total tahun 2023 s.d 2024	94
3.27	Sasaran Strategi 3.4 Menurunnya Pengangguran	94
3.28	Perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 s.d 2024	96
3.29	Sasaran Strategi 3.5 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	97
3.30	Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Gender Tahun 2022 s.d 2024	97
3.31	Sasaran Strategi 3.5 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	98

3.32	Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2022 s.d 2024	100
3.33	Sasaran Strategi 7 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	100
3.34	Perbandingan realisasi Indeks Keluarga Sehat tahun 2022 s.d 2024	101
3.35	Sasaran Strategi 4.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	102
3.36	IKM Unit Pelayanan x 25	102
3.37	Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2022 s/d 2024	102
3.38	Hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut	104
3.39	Rincian hasil evaluasi Sakip tahun 2024	104
3.40	Presentase Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 s/d 2024	105
3.41	Perbandingan realisasi Predikat SAKIP tahun 2022 s.d 2024	109
3.42	Perbandingan realisasi Indeks SPBE Tahun 2022 s.d 2024	111
3.43	Sasaran Strategi 4.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	111
3.44	Perbandingan Opini BPK Tahun 2022 s.d 2024	113
3.45	Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2024	113

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 ditanyakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

1.2.1 Kondisi Geografi

Letak, Luas, Batas Wilayah Administrasi dan Kondisi Geografi Kabupaten Flores Timur terletak antara 08°04'-08° 40'LS dan 122°38'-123°57'BT. Dengan luas wilayah seluruhnya 5.983,38 km², terdiri dari luas daratan 1.812,85 km² (31% luas wilayah) yang tersebar pada 3 pulau besar dan 27 pulau kecil serta luas lautan 2.064,65 km² (69% luas wilayah), dan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sawu,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata.

Gambar 1.1

Peta Wilayah Kabupaten Flores Timur



Topografi Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah berbukit dan bergunung. Kondisi alam tersebut ditandai dengan tingkat kemiringan 12 %, ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Tingkat Kondisi wilayah geografis yang demikian dibarengi dengan keadaan iklim yang kering mengakibatkan wilayah Flores Timur rawan bencana longsor dan banjir. Kabupaten Flores Timur berada dalam jalur gunung api yang masih aktif sebanyak 4 (empat) gunung yaitu gunung Lewotobi laki-laki dan perempuan, gunung Leraboleng di Pulau Flores dan gunung Ile Boleng di Pulau Adonara. Kabupaten Flores Timur memiliki 290 mata air yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan debit antara 0,5-20 liter perdetik. Sumber mata air tersebut umumnya berada pada kawasan hutan dengan luas

44,390,78 Ha. Kondisi klimatologi mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan terbagi ke dalam 229 desa dan 21 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tanjung Bunga yakni 257,57 km² (14,21% dari total luas Kabupaten Flores Timur), sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Solor Selatan yakni sebesar 1,74%. Rincian luas wilayah Kabupaten Flores Timur menurut kecamatan sebagaimana pada tabel 1.1 berikut;

Tabel 1.1		Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas Kecamatan di Kabupaten Flores Timur Tahun 2024			
Pulau	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Daerah Area (Km ²)	Luas (%)
	1. Wulanggitang	11	-	225,85	12,46
	2. Titehena	14	-	154,84	8,54
	3. TanjungBunga	16	-	257,57	14,21
	4. Ile Mandiri	8	-	72,76	4,01
	5. Larantuka	2	18	48,91	2,70
	6. DemonPagong	7	-	85,40	4,71
	7. Ile Bura	7	-	118,32	6,53
	8. Lewolema	7	-	92,84	5,12
Flores Timur Daratan		72	18	1.056,49	58,28
	9. Solor Barat	14	1	128,20	7,08
	10. Solor Timur	17	-	66,56	3,68
	11. Solor Selatan	7	-	31,85	1,74
Solor		38	1	226,61	12,50
	12. Adonara Barat	18	-	79,71	4,40
	13. Wotan Ulumado	12	-	86,31	4,76
	14. Adonara Timur	19	2	91,06	5,02
	15. Ile Boleng	21	-	49,30	2,72
	16. Witihama	16	-	79,43	4,38
	17. Klubagolit	12	-	44,41	2,46
	18. Adonara Tengah	13	-	42,73	2,36
	19. Adonara	8	-	56,80	3,13
Adonara		119	2	529,75	29,22
Flores Timur		229	21	1.812,85	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2024

1.2.2 Kondisi Demografis

Perkembangan Penduduk Kabupaten Flores Timur pada akhir tahun 2023 berjumlah sebanyak 289,376 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 142.684 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 146.692 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 159.62 jiwa/km². Secara rinci sebaran penduduk disetiap kecamatan terlihat pada tabel 1.2 berikut;

Tabel 1.2		Luas Wilayah, Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2023			
KECAMATAN	Luas Wilayah (Km ²)	Jenis Kelamin			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Wulanggitang	225,85	7.661	7.714	15.375	68,08
Titehena	154,84	6.866	6.917	13.783	89,01
Larantuka	48,91	20.746	20.896	41.642	851,40
Ile Mandiri	72,76	6.014	6.055	12.069	165,87
Tanjung Bunga	257,57	7.767	7.701	15.464	60,04
Solor Barat	128,20	5.655	5.928	11.583	90,35
Solor Timur	66,56	8.440	8.626	17.066	256,40
Adonara Barat	79,71	7.276	7.178	14.454	181,33
Wotan Ulumado	86,31	5.337	5.292	10.629	123,15
Adonara Timur	91,06	15.245	16.182	31.427	345,12
Klubagolit	44,41	6.289	6.910	13.199	297,21
Witihama	79,43	8.746	9.462	18.208	229,23
Ile Boleng	49,30	8.739	9.447	18.186	368,88
Demon Pagong	85,40	2.537	2.512	5.049	59,12
Lewolema	92,84	5.022	4.993	10.015	107,87
Ile Bura	118,32	3.925	3.866	7.791	65,85
Adonara	56,80	5.835	6.149	11.984	210,99
Adonara Tengah	42,73	7.003	7.169	14.172	331,66
Solor Selatan	31,85	3.585	3.695	7.280	228,57
FLORES TIMUR	1.812,85	142,684	146.692	289.376	159,62

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024 (data olahan)

Tabel di atas menggambarkan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Larantuka dengan 41,642 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Demon Pagong dengan jumlah 5,049 jiwa.

1.2.2.1 Penduduk Menurut Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat memberikan suatu ciri terhadap penduduk, apakah tergolong sebagai penduduk yang produktif atau yang tidak produktif. Komposisi seperti ini dapat menggambarkan pola perilaku sosial ekonomi penduduk. Penduduk yang berumur 0–14 tahun dan yang berumur lebih dari 64 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang tidak produktif. Komposisi penduduk menurut umur di Flores Timur dapat disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3 Penduduk Flores Timur Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-04	8.416	7.666	16.082
2	05-09	12.723	11.631	24.354
3	10-14	14.355	13.259	27.614
4	15-19	14.856	13.822	28.678
5	20-24	14.626	13.984	28.610
6	25-29	12.451	11.692	24.143
7	30-34	10.349	10.311	20.660
8	35-39	9.469	9.510	18.979
9	40-44	8.980	9.457	18.437
10	45-49	7.801	9.100	16.901
11	50-54	7.563	8.686	16.249
12	55-59	6.383	7.778	14.161
13	60-64	5.120	6.478	11.598
14	65-69	3.818	5.123	8.941
15	70-74	2.594	3.691	6.285
16	75+	3.180	4.504	7.684
Jumlah		142.684	146.692	289.376

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Flores Timur, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia muda (15-24 tahun) sangat mendominasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Flores Timur tengah memasuki era bonus demografi, dimana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan.

1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. TPAK adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Untuk

melihat bagaimana keadaan TPAK di Kabupaten Flores Timur akan disajikan dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin 2023

Jenis Kegiatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	84.277	68.357	152.634
a. Bekerja	80.355	66.496	146.851
b. Pengangguran	3.922	1.861	5.783
Bukan Angkatan Kerja	17.368	40.518	57.886
a. Sekolah	7.791	9.628	17.419
b. Mengurus Rumah Tangga	2.230	27.255	25.925
c. Lain – lain	7.347	3.635	10.982
Jumlah	101.645	78.875	210.520
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,50		
Tingkat Pengangguran	3,79		

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2024

Dari tabel 1.4. di atas, menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 adalah 72,50% dan tingkat pengangguran terbuka 3,79%. Capaian tingkat pengangguran ini mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 0,3 point dengan capaian 3,49%.

1.2.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

1.2.3.1 Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total produk/nilai tambah semua sector ekonomi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Flores Timur dalam satu periode/tahun tertentu. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ialah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi pada satu tahun yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada tahun tersebut. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah total produk/nilai tambah dari semua kegiatan ekonomi yang dinilai dengan harga satuan per komoditi pada satu tahun tertentu.

Penyajian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku bertujuan memberikan gambaran tentang jumlah nilai tambah (PDRB) yang telah dibentuk oleh setiap kegiatan ekonomi pada periode berjalan (berlaku). Disamping itu juga dapat diperoleh gambaran tentang peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam membentuk nilai tambah maupun rata-rata pendapatan penduduk pada periode berjalan. Tabel 1.5 berikut ini dapat kita lihat

bagaimana perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2019 sampai dengan 2023

Tabel 1.5

PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)
Tahun 2018-2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,37	27,45	28,07	28,90	29,04
Pertambangan dan Penggalan	0,89	0,90	0,88	0,85	0,83
Industri Pengolahan	0,84	0,84	0,82	0,83	0,94
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	4,79	4,28	4,45	4,43	4,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,60	8,30	8,15	8,39	8,84
Transportasi dan Pergudangan	5,39	5,20	5,15	5,30	5,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Informasi dan Komunikasi	4,37	4,93	4,68	4,65	4,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,78	4,12	4,34	4,51	4,36
Real Estate	3,10	3,03	2,93	3,01	2,96
Jasa Perusahaan	0,16	0,10	0,08	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,10	17,68	17,98	17,26	16,70
Jasa Pendidikan	16,06	16,15	15,57	15,10	15,25
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34	2,56	2,70	2,61	2,72
Jasa lainnya	5,01	4,27	4,00	3,89	3,76
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka, 2023

Dari Tabel 1.5 diatas menggambarkan bahwa kontribusi terbesar PDRB Kabupaten Flores Timur pada tahun 2023 masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 29,04 % dari nilai total PDRB. Data yang ada menunjukkan bahwa sumbangsih sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap nilai total PDRB di Kabupaten Flores Timur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangsih sebesar 27,37% dari total nilai PDRB, kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 27,45% dan tahun 2021 meningkat menjadi 28,07% serta tahun 2022 meningkat 28,90%.

Perbandingan PDRB Harga Konstan disuatu wilayah antara suatu tahun dengan tahun sebelumnya merupakan perbandingan kuantum produk antara dua tahun tanpa dipengaruhi oleh harga (inflasi/deflasi) pada tahun yang bersangkutan. Dengan

demikian perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari suatu tahun ke tahun berikutnya adalah pertumbuhan riil ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 1.6

PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Tahun 2019-2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.31	0.29	2.00	3.67	4.32
Pertambangan dan Penggalian	5.89	0.04	0.73	0.22	1.39
Industri Pengolahan	5.01	-3.49	0.03	3.97	11.16
Pengadaan Listrik dan Gas	0.91	12.09	0.55	7.04	11.19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.28	2.97	5.91	5.51	2.05
Konstruksi	5.35	-9.95	4.38	-0.53	4.40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.03	-5.57	-0.32	4.14	5.81
Transportasi dan Pergudangan	2.95	-2.68	0.52	3.33	2.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.70	-16.85	1.02	4.01	9.71
Informasi dan Komunikasi	5.56	14.21	-3.88	2.61	3.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.38	9.54	2.79	0.83	1.99
Real Estate	-0.58	-1.36	0.24	0.12	2.10
Jasa Perusahaan	3.88	-36.16	-21.49	2.39	2.14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.94	4.27	2.45	0.16	0.15
Jasa Pendidikan	4.82	-0.09	-2.95	-0.61	3.44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.18	4.38	5.36	1.01	3.48
Jasa lainnya	4.75	-15.39	-5.16	0.53	2.51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.80	0.14	0.69	1.71	3.15

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2023

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Flores Timur pada tahun 2023 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Flores Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3,69 triliun rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut meningkat dari 3,58 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.14 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya 2020 yang yakni sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat di lihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023

Uraian PDRB	PDRB Kabupaten Flores Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.31	0.29	2.00	3.67	4.32
Pertambangan dan Penggalian	5.89	0.04	0.73	0.22	1.39
Industri Pengolahan	5.01	-3.49	0.03	3.97	11.16
Pengadaan Listrik dan Gas	0.91	12.09	0.55	7.04	11.19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.28	2.97	5.91	5.51	2.05
Konstruksi	5.35	-9.95	4.38	-0.53	4.40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.03	-5.57	-0.32	4.14	5.81
Transportasi dan Pergudangan	2.95	-2.68	0.52	3.33	2.69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.70	- 16.85	1.02	4.01	9.71
Informasi dan Komunikasi	5.56	14.21	-3.88	2.61	3.25
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.38	9.54	2.79	0.83	1.99
Real Estate	-0.58	-1.36	0.24	0.12	2.10
Jasa Perusahaan	3.88	-36.16	- 21.49	2.39	2.14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.94	4.27	2.45	0.16	0.15
Jasa Pendidikan	4.82	-0.09	-2.95	-0.61	3.44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.18	4.38	5.36	1.01	3.48
Jasa lainnya	4.75	-15.39	-5.16	0.53	2.51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.80	0.14	0.69	1.71	3.15

Sumber : BPS Kabupaten Flores Timur, 2022

Tabel 1.7 di atas menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Flores Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 4,74 persen, naik menjadi 4,80 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2021 menurun menjadi 0,69 persen akibat pandemic Covid-19. Tahun 2022 walaupun lambat, pertumbuhan ekonomi Flores Timur mulai meningkat menjadi 1,71 persen.

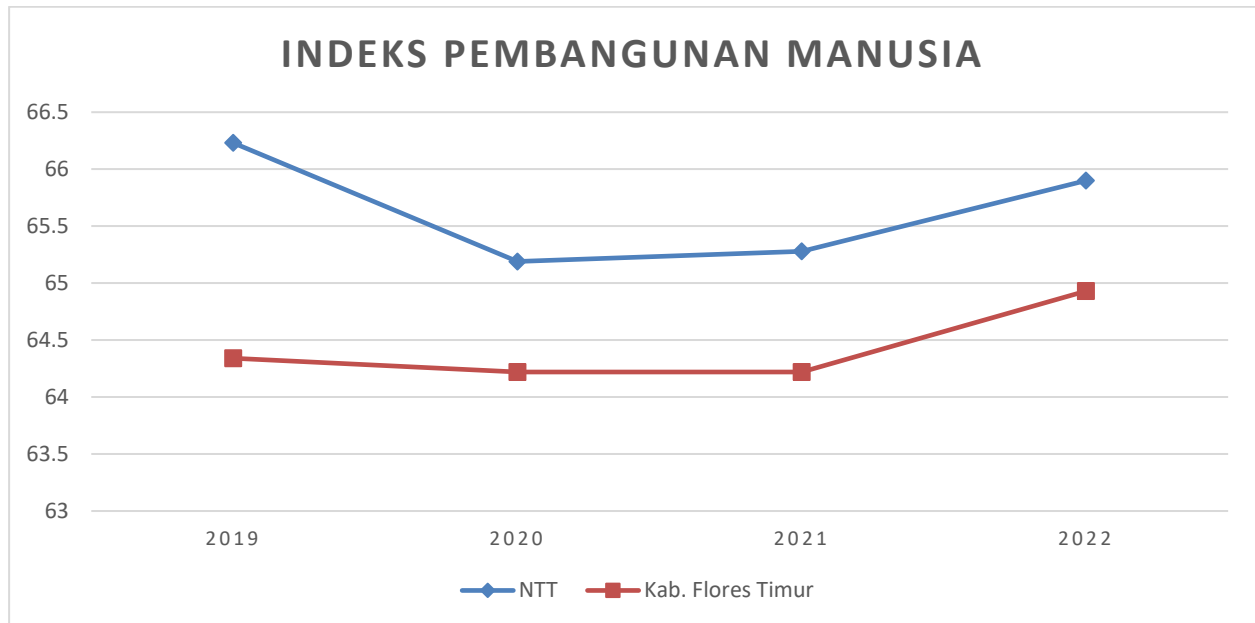
Dengan mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tiap-tiap sektor yang ada di Kabupaten Flores Timur, diharapkan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan potensi sektor yang ada untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

1.2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit dari gabungan 3 (tiga) indikator, yaitu usia harapan hidup, angka melek huruf serta rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM mengukur secara spesifik pencapaian masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, untuk mencapai dan mempertahankan standar kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Sampai dengan tahun 2023, IPM Flores Timur mencapai 65,75. Jika dibandingkan dengan rata – rata IPM di NTT maka perkembangan IPM Flores Timur berada di peringkat 10 dan di bawah rata-rata Provinsi NTT sebesar 66,68.



Sumber : BPS, Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2023

1.2.4 Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur staf yang diwadahi dalam Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang diwadahi dalam Sekretariat DPRD Tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam Inspektorat Daerah Tipe A;
4. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana yang diwadahi dalam dinas- dinas daerah, terdiri dari:

- a Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan serta urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- c Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- d Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- e Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
- i Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- l Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang

Transmigrasi;

- m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
 - n. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
 - o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - p. Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan;
 - s. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Peternakan;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan Perikanan; dan
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang yang diwadahi dalam badan-badan daerah, terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan Pembangunan, serta fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan, sub urusan Pendapatan; dan

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Flores Timur Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

6. Kecamatan, terdiri dari:

- a. Kecamatan Larantuka dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Adonara Timur dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Adonara Barat dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Adonara dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Adonara Tengah dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Kelubagolit dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Witihamo dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Ile Boleng dengan Tipe A;
- i. Kecamatan Wotan Ulumado dengan Tipe A;
- j. Kecamatan Tanjung Bunga dengan Tipe A;
- k. Kecamatan Wulanggitang dengan Tipe A;
- l. Kecamatan Titehena dengan Tipe A;
- m. Kecamatan Lewolema dengan Tipe A;
- n. Kecamatan Ile Mandiri dengan Tipe A;
- o. Kecamatan Ile Bura dengan Tipe A;
- p. Kecamatan Demon Pagong dengan Tipe A;
- q. Kecamatan Solor Timur dengan Tipe A;
- r. Kecamatan Solor Barat dengan Tipe A; dan
- s. Kecamatan Solor Selatan dengan Tipe A.

1.2.5 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Nominatif PNS dan P3K lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 keadaan 31 Desember 2024 sebanyak 5.527 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.224 orang dan perempuan sebanyak 3.303 orang. Pada Tabel 1.8 dan 1.9 digambarkan rincian PNS berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.8

Jumlah ASN (PNS & PPPK) Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	SD	5	5	10
2	SLTP	26	4	30
3	SLTA	398	276	674
4	D.I		10	10
5	D.II	50	39	89
6	D.III	268	974	1.242
7	S.1/D-IV	1.406	1.898	3.304
8	S.2	70	97	167
9	S.3	1	-	1
Jumlah		2.224	3.303	5.527

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2024

Tabel 1.9

Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1	Gol.I	39	12	51
2	Gol.II	374	570	944
3	Gol.III	1.481	2.472	3.953
4	Gol.IV	324	190	514
Jumlah		2.218	3.244	5.462

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2024

Berdasarkan data Jabatan Struktural Tahun 2024, terdapat 557 Jabatan dengan 423 Jabatan terisi dan masih terdapat 134 jabatan yang lowong keadaan 31 Desember Tahun 2024 sesuai tabel 1.10 di bawah ini :

Tabel 1.10

Data Jabatan Struktural menurut Jumlah Jabatan, Jabatan Terisi dan Jabatan Lowong

No.	Jabatan	Jumlah Jabatan	Jabatan	
			Terisi	Lowong
1	JPT	36	34	2
2	Administrator	181	133	48
3	Pengawas	340	256	84
Jumlah		557	423	134

Sumber : BKPSDMD Kabupaten Flores Timur, 2022

1.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

1.3.1 Permasalahan Terkait Program Prioritas

Berdasarkan gambaran umum daerah dan hasil evaluasi maka teridentifikasi berbagai permasalahan yang menjadi perhatian di tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Masih rendahnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. Menurunnya harmonisasi hubungan sosial antar warga;
 - c. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender;
 - e. Rendahnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Tingginya angka DO;
 - h. Rendahnya Pelayanan dan Pembinaan KB;
 - i. Rendahnya Kualitas derajat kesehatan masyarakat dan Pelayanan Kesehatan;
 - j. Masih adanya Kasus Gizi Buruk;
 - k. Kurangnya sarana dan prasarana Kesehatan;
 - l. Angka stunting yang tergolong tinggi;
 - m. AKI/AKB dan angka kesakitan masih tinggi;
 - n. Belum adanya lembaga perlindungan anak;
 - o. Rendahnya keterampilan tenaga kerja;
 - p. Lemahnya Pendampingan Kelompok Masyarakat.
2. Bidang Ekonomi
 - a. Rendahnya pendapatan masyarakat;
 - b. Kurangnya penyediaan lapangan kerja baru;
 - c. Penguatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaannya;
 - d. Sinergisitas antara pemangku kepentingan;
 - e. Pemetaan Kawasan;
 - f. Aktifitas Ekonomi berbasis potensi lokal;
 - g. Penerapan teknologi pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan;
 - h. Ketersediaan energi, protein, lemak;
 - i. Pola panganekaragaman pangan;
 - j. Pemberdayaan masyarakat pesisir;

- k. Regulasi terkait pengolahan sumber daya hayati laut dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove;
 - l. Perluasan pemasaran garam.
3. Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- a. Kondisi jalan dan jembatan kabupaten yang tidak mantap;
 - b. Belum tersedianya perlengkapan pengaman jalan;
 - c. Prasarana transportasi laut belum memadai;
 - d. Peralatan uji kir belum berfungsi;
 - e. Pendistribusian air PDAM kurang merata;
 - f. Menurunnya debit air pada sumber mata air;
 - g. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan ruang di daerah sekitar mata air;
 - h. Masih kurangnya prasarana pengaman pantai dan pengendali banjir dan normalisasi sungai/kali mati;
 - i. Masih ada pertambangan tanpa ijin yang dilakukan masyarakat;
 - j. Belum ada dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - k. Masih ada lahan kritis pada daerah yang berpotensi banjir dan longsor;
 - l. Masih banyak beceklog;
 - m. Masih banyak sumber air baku yang belum diuji kualitasnya;
 - n. Belum optimalnya sarana dan prasarana sampah perkotaan;
 - o. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah;
 - p. Masih ada desa yang belum teraliri listrik;
 - q. Belum maksimalnya penegakan Perda Tata Ruang.
4. Bidang Pemerintahan
- a. Kurangnya Infrastruktur pendukung dalam peningkatan pelayanan publik;
 - b. Rendahnya Kapasitas SDM Aparatur;
 - c. Rendahnya kerjasama antar Stakeholder/lintas sector;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi;
 - e. Rendahnya sistem pengawasan dan penegakan produk hukum;
 - f. Lemahnya sistem dan prosedur tata kelola pemerintah daerah

1.3.2 Permasalahan pada aspek geografis.

Pada aspek geografis permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Kondisi geografis dengan topografi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan berpotensi menimbulkan bencana alam. Dari aspek ini Kabupaten Flores Timur menjadi salah satu daerah yang rawan bencana alam;
2. Tingkat pertumbuhan penduduk tergolong tinggi, sex ratio yang besar, dan penyebaran penduduk yang tidak merata.

1.3.3 Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat

Pada aspek ini menampilkan sejumlah permasalahan adalah :

1. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB;
2. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan capaian provinsi dan nasional;
3. Rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin, KAT dan PMKS lainnya untuk mengkomulasi modal produktif, sumber-sumber keuangan, modal sosial dan sarana fisik;
4. Rendahnya kontribusi lembaga kesejahteraan sosial dalam membantu penanganan masalah sosial di masyarakat;
5. Tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas pelayanan, penempatan dan perlindungan TKI;
6. Di bidang olahraga prasarana dan sarana olahraga masih sangat terbatas.

1.3.4 Permasalahan pada aspek pelayanan umum

Pada aspek pelayanan umum terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai;
3. Jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang belum memadai;
4. Belum optimalnya penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan dan keamanan pangan serta Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang belum menjadi budaya dalam masyarakat;
5. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang KB yang berdampak kurangnya jumlah peserta akseptor KB maupun akses terhadap fasilitas KB;
6. Infrastruktur transportasi wilayah belum memadai;
7. Sistem dan prosedur kerja dilingkungan aparatur Negara belum efisiensi, efektif dan berperilaku hemat;
8. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah belum memiliki SPM dan SOP;
9. Capaian laporan kinerja keuangan yang masih pada level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diakibatkan oleh neraca aset yang belum optimal;

10. Belum optimalnya pelayanan persampahan, karena belum tersedianya TPS secara merata dalam kota dan TPK di luar kota;
11. Belum efektifnya fungsi dan peran infrastruktur dan suprastruktur politik serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perumusan kebijakan;
12. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah serta masih rendahnya kapasitas keuangan daerah dalam memenuhi tuntutan pembangunan serta belum efektifnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
13. Belum efektifnya lembaga penyelenggara Negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat dalam menjamin kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat dan masih terbatasnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak asasi manusia, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

1.3.5 Permasalahan pada aspek daya saing

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani;
2. Rendahnya pendapatan asli daerah;
3. Belum memadainya aksesibilitas daerah;
4. Minimnya ketersediaan lembaga keuangan mikro;
5. Belum berkembangnya investasi di daerah;
6. Rendahnya kualitas tenaga kerja Flores Timur.

1.3.6 Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu global, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Sejalan dengan isu global, nasional dan provinsi NTT, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan selama kurun waktu tahun 2023 - 2026,, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:

1. Rendahnya daya saing daerah khususnya di bidang ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur;
2. Kemiskinan, stunting dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat makin lebar;
3. Kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana;

4. Kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat;
5. Kualitas layanan kesejahteraan sosial masyarakat;
6. Pengarustamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah menuju era industri digital; dan
8. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

1.4 Sistematika

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Kondisi Geografis, Data Demografi, Kondisi Ekonomi Daerah dan Kondisi serta Permasalahan Utama (*strategis issue*) dan Sistematika penyajian LKIP Kabupaten Flores Timur.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis Pembangunan, Arah Kebijakan, Rencana Strategis dan Program Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Flores Timur 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya dalam rangka *feed back* dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis Kabupaten Flores Timur

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 sebagai tahun transisi akibat adanya kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, RPD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 senantiasa berpedoman pada RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020- 2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026 dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). RPD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi dan Misi

RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing. Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/ terakhir yang ingin dicapai adalah:

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026 yang disusun berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022. Sehingga dalam penyusunannya, karena ketiadaan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah, RPD Tahun 2023-2026 diarahkan pada pencapaian Visi RPJPD Tahun 2005-2025 yakni **“Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing”**, dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahap keempat/terakhir yang ingin dicapai adalah:

- 1) Terwujudnya jaminan kehidupan bermartabat;
- 2) Meningkatnya kemampuan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan;
- 3) Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali;
- 4) Meningkatnya kualitas SDM;
- 5) Tersedianya tenaga kerja produktif di sektor usaha ekonomi daerah;
- 6) Meningkatnya infrastruktur dasar dan transportasi untuk mendukung perekonomian daerah;
- 7) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial.

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas, serta memperhatikan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, kondisi faktual, permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan

pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2023-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Daya Saing Daerah.

Pelaksanaan pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi potensi dan sumber daya daerah yang dimiliki dalam rangka terwujudnya daya saing daerah melalui sasaran pembangunan:

- a. Terwujudnya daya saing ekonomi, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; Pertumbuhan PDRB; Laju inflasi daerah; Jumlah investor; Jumlah wisatawan; dan Indeks Desa Membangun.
- b. Terwujudnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: Rata-rata lama sekolah; Angka harapan lama sekolah; Angka Drop Out; Rasio lulusan Sarjana; Magister dan Doktor; Angka Melek Huruf; Angka Harapan Hidup; Angka Kesakitan; dan Tingkat pengangguran terbuka.
- c. Terwujudnya daya saing infrastruktur, yang dapat diukur dari pencapaian kinerja: tingkat kemantapan jalan; Sarana dan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik; Sarana dan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik; Persentase jaringan irigasi; Akses air minum aman; Akses sanitasi aman dan layak; serta Persentase jaringan intra pemerintah.

2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan Flores Timur diarahkan pada pemanfaatan tata ruang agar dapat berdayaguna, dan peningkatan infrastruktur dasar yang terencana, selaras, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan ditandai dengan tercapainya sasaran pembangunan :

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata, yang diukur dari pencapaian kinerja: Tingkat Kemiskinan.
- b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas.

Pembangunan Flores Timur ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Flores Timur yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta adaptif, inovatif dan terampil dalam rangka terwujudnya manusia yang berkualitas melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: APK dan APM PAUD/TK; APK dan APM SD/MI/ Paket A; APK dan APM SMP/ MTs/Paket B; Angka melanjutkan Pendidikan SD ke SMP; dan Angka melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Keluarga Sehat; Angka Kematian Ibu; Angka Kematian Bayi; Prevalensi Stunting; dan Cakupan pelayanan vaksinasi Covid 19 (Vaksin kedua).
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk dan layanan Keluarga Berencana, yang diukur dari pencapaian kinerja: Angka Kelahiran Total.
- d. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase PMKS.
- e. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Pembangunan Gender; Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan; dan Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak.

- f. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, yang diukur dari pencapaian kinerja: Persentase organisasi pemuda yang aktif; dan Persentase wirausaha muda.

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah yang handal harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Flores Timur yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance ditujukan pada terwujudnya tata kelola pemerintah pemerintahan yang baik melalui sasaran pembangunan:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang diukur dari pencapaian kinerja: Indeks Kepuasan masyarakat; Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan; Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah; Opini BPK, Persentase Penurunan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan; Persentase keterlibatan masyarakat dalam Pemilu; Persentase OPD yang terhubung dengan website Pemda; Persentase penjabaran dan konsistensi program RPJMD ke RKPD; Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;

2.2

Strategi Pembangunan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2023- 2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan pada tabel 2.1 berikut;

Tabel 2.1

Strategi pembangunan pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
1	Terwujudnya daya saing daerah	1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	1.1.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah
				1.1.2	Meningkatkan kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah
				1.1.3	Pengembangan agroindustri
				1.1.4	Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB
				1.1.5	Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala
				1.1.6	Penciptaan iklim investasi yang kondusif
				1.1.7	Meningkatkan daya tarik pariwisata
				1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa
		1.2	Terwujudnya daya saing SDM	1.2.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata pada semua tingkat pendidikan
				1.2.2	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan pendidikan non formal yang bermutu
				1.2.3	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
				1.2.4	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
				1.2.5	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi
		1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.3.1	Meningkatkan kualitas jalan
				1.3.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut
				1.3.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat
				1.3.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				1.3.5	Meningkatkan akses air minum masyarakat

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
				1.3.6	Meningkatkan akses sanitasi aman dan layak bagi masyarakat
				1.3.7	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung
2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata	2.1.1	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin
				2.1.2	Peningkatan pendapatan keluarga miskin
		2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				2.2.2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
3	Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas	3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan dan SDM Pendidik
		3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.2.1	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
		3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	3.3.1	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB
		3.4	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	3.4.1	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS
				3.4.2	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat
		3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak	3.5.1	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	3.6.1	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemuda

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
(1)		(2)		(3)	
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	4.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik
				4.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN
				4.1.3	Optimalisasi Potensi PAD
				4.1.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah
				4.1.5	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerinah daerah.
				4.1.6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu.
				4.1.7	Meningkatkan keterlibatan OPD dalam website pemda
				4.1.8	Peningkatan konsistensi antar dokumen perencanaan.
				4.1.9	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan.
				4.1.10	Peningkatan kesadaran hukum.
				4.1.11	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.
				4.1.12	Penguatan fungsi Litbang Daerah
				4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan Pembangunan kabupaten Flores Timur merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah bersama stakeholders terkait agar lebih optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan pembangunan kabupaten Flores Timur selama periode tahun 2023-2026, sebagaimana diuraikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

**Arah Kebijakan Pembangunan dari masing-masing Startegi
Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026**

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 1: Terwujudnya daya saing daerah					
1.1.1	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian berbasis kawasan sesuai potensi wilayah	Penguatan Kelembagaan Petani dan Penyuluh	Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	Pengolahan hasil dan Pasca Panen	
		Pemetaan potensi wilayah dan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian			
1.1.2	Meningkatkan kualitas produksi, promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Penguatan kelembagaan industri	Peningkatan kualitas produksi	Peningkatan promosi dan pemasaran produk	
1.1.3	Pengembangan agroindustri				
1.1.4	Meningkatkan nilai tambah sektor penyumbang PDRB	Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses produksi			
		Perluasan sistem dan jaringan pemasaran			
1.1.5	Pengawasan dan Pengendalian harga bahan pokok melalui aplikasi secara berkala	Pengendalian bongkar muat barang			
		Publikasi harga bahan pokok melalui aplikasi			
1.1.6	Penciptaan iklim investasi yang kondusif	Pemetaan potensi Investasi	Pemantapan OSS	Promosi Potensi Investasi Daerah	
1.1.7	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Penguatan kapasitas pelaku pariwisata	Peningkatan aksesibilitas dan amenities	Promosi dan pemasaran pariwisata	
		Peningkatan atraksi pariwisata			
1.1.8	Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa	Penguatan kelompok ekonomi masyarakat dan pemberdayaan PKK			
		Penguatan kelembagaan BUMDES			

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.2.1	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata pada semua tingkat pendidikan	Pemberian Beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi			
1.2.2	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan pendidikan non formal yang bermutu	Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan non formal			
		Memperbanyak tutor pendidikan keaksaraan di desa dengan memberdayakan sarjana pendidikan di desa			
		Mengembangkan layanan perpustakaan daerah dan memperkuat perpustakaan desa			
1.2.3	Peningkatan jaminan Kepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Peningkatan jaminan layanan kesehatan dan peningkatan gernas			
1.2.4	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif				
1.2.5	Meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi	Penyusunan Kajian dan SID Pembangunan BLK	Revitalisasi dan Optimalisasi BLK		
		Membangun koordinasi dan kerja sama BLK milik swasta			
1.3.1	Meningkatkan kualitas jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan di ibukota kabupaten			
		Pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah			
		Peningkatan Status Jalan			
1.3.2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana transportasi laut			
1.3.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi darat	Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana transportasi darat			
1.3.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Pemetaan Daerah Irigasi	Pembangunan dan pemeliharaan Daerah Irigasi		
1.3.5.	Meningkatkan akses air minum masyarakat	SID air bersih	Pembangunan dan peningkatan jaringan air minum		

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan					
2.1.1	Peningkatan pendapatan keluarga miskin	Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	Fasilitasi Bantuan Sosial dan Pengembangan Ekonomi		
2.1.2	Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	Peningkatan sarana dan prasarana layak			
2.2.1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan fungsi laboratorium lingkungan hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
		Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan pengrusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			
		Optimalisasi penanganan dan pengolahan sampah			
2.2.2	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota			
Tujuan 3: Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas					
3.1.1	Meningkatkan kualitas Fasilitas Pendidikan dan SDMPendidik	Optimalisasi Penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal yang bermutu			
		Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional			
		Peningkatan Mutu, kualifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan			
3.2.1	Peningkatan jaminanKepastian memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Optimalisasi pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga (PISPK)			
		Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas			
		Meningkatan pengendalian dan pengawasan sistem jaminan kesehatan masyarakat			
		Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan secara merata			
3.3.1	Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB	Penataan Pengendalian Kependudukan			
		Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana melalui KIE yang intens.			

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.1	Meningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS	Mempercepat upaya perlindungan sosial, pemberdayaan sosial serta rehabilitasi sosial			
3.4.2	Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat				
3.5.1	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak			
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak			
3.6.1	Pembinaan, Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Pemuda	Revitalisasi Organisasi Kepemudaan			
		Peningkatan pembinaan, pendampingan dan penguatan kapasitas bagi Pemuda			
		Menyediakan Sarpras olahraga yang memenuhi standar dan menciptakan atlet berprestasi			
Tujuan 4: Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik					
4.1.1	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah daerah			
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.			
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perijinan.			
4.1.2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas ASN	Penataan sistem administrasi ASN			
		Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur			
4.1.3	Optimalisasi Potensi PAD	Pendataan dan penetapan obyek PAD	Implementasi digitalisasi sistem pungutan PAD		
4.1.4	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah	Penertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset.	Pendampingan pengelolaan keuangan dan aset daerah		
4.1.5	Peningkatan kualitas pengawasan, penyelenggaraan pemerinah daerah.	Peningkatan peran penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.			

STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN			
		2023	2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
4.1.6	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pemilu.	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.			
4.1.7	Meningkatkan keterlibatan OPD dalam website pemda	Meningkatkan kualitas website pemda			
4.1.8	Peningkatan konsistensi antardokumen perencanaan.	Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu.			
4.1.9	Peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Pengawasan.	Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas (Target dan Saaranjelas, terukur) dan Partisipatif dan tepat waktu.			
4.1.10	Peningkatan kesadaran hukum.	Peningkatan pemahaman masyarakat akan Peraturan Perundang-Undangan dan HAM.			
		Peningkatan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.			
4.1.11	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana.	Peningkatan upaya mitigasi, pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.			
4.1.12	Penguatan fungsi Litbang Daerah	Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM kelitbangan			
4.1.13	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.	Penataan Administrasi Umum Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;			
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur Desa			

2.4 Rencana Strategis dan Program Kegiatan

Perumusan program dan rencana strategi pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan serta target yang akan dicapai. Dalam rangka pencapaian kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Flores Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan

periode tahun 2023-2026, Keberhasilan capai Kabupaten Flores timur dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan RPD. Indikator dan target sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3

Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan RPD

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
Tujuan 1			Terwujudnya daya saing daerah					
Sasaran 1.1			Terwujudnya Daya Saing Ekonomi					
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentasi Lembaga Petani tingkat madya (%)	1,95	2,93	3,90	4,88
					0,74	1,47	18,38	2,21
				Rasio Penyuluh perdesa (rasio)	19,85	20,58	19,85	19,85
3	27	02	Program Penyediaan danPengembangan Sarana Pertanian	Cakupan pemenuhan sarana pertanian (%)	17,24	19,08	21,65	23,41
					48	50	52	54
3	27	03	Program Penyediaan danPengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan pemenuhan prasarana pertanian (%)	24,65	28,15	32,05	36,5
					50	52,63	54	57,89
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap (%)	38,19	38,96	39,73	40,5
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase hasil olahan produk perikanan yang dipasarkan	0,43	0,76	1,09	1,42
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang bergerak di bidangpertanian yang memilikiBadan Hukum (%)	1,04	1,67	2,08	2,50
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase industri skala kecil dan menengah yang mengelola hasil pertanian (%)	15,15	30,30	45,45	60,61
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan sarana distribusi perdagangan (%)	27,78	30,56	33,33	36,11
3	30	04	Program Stabilisasi HargaBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalnya harga barang (perbandingan harga pasar dgn harga dasar) (Laporan)	19	19	19	19
3	30	07	Program Penggunaan danPemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan IKM yang difasilitasi (%)	18,18	22,73	27,27	31,82

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi pengembangan iklim penanaman modal (%)	100	100	100	100
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentasi promosi penanaman modal (%)	100	100	100	100
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentasi fasilitasi pelayanan perizinan (%)	89	93	96	100
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase prasarana dan sarana pariwisata (%)	73,53	79,41	85,29	91,17
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	100	100	100	100
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase promosi dan pemasaran pariwisata (%)	50	66,67	83,33	91,17
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	46,72	51,97	57,21	62,45
				Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	70,31	65,9
				Persentase Aparatur Desa yang di Tingkatkan Kapasitasnya (%)				
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang PADes-nya meningkat (%)	10,53	10,53	11,00	10,53
Sasaran 1.2			Terwujudnya daya saing SDM					
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	57	58	59	60
				APM PAUD (%)	57	59	62	65
				APK SD (%)	97	98	99	100
				APM SD (%)	89	89	90	90
				APK SMP (%)	96	97	99	100
				APM SMP (%)	67	68	69	70
				Penurunan Buta Huruf (%)	46	44	42	40
				Angka DO (%)	1,20	1,17	1,13	1,10
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA (%)	100	100	100	100

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	26,11	29,83	33,57	37,29
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	100	100
				Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	22,85	23,94	25,02	26,11
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	50,72	52,50	54,29	56,07
				Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	55	58	61	64
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa (Mahasiswa)	531	631	731	831
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan penyelenggaraan perpustakaan (%)	37,50	41,67	45,84	50,00
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	57	59	61	63
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	93,3	95	95
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	82,5	83,7	85	86,2
				Presentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	33,29	52,29	71,29	90,29
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	67,7	72,8	76,4	80
				Angka Gizi Buruk (%)	0,3	0,2	0,1	0,1
				Cakupan Desa/Kelurahan STBM	60,8	67,2	73,6	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	97	98
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standard (%)	100	100	100	100

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	75	85	95	100
				Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	60	65	70	75
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja sedang mencari pekerjaan yang mendapat pelatihan (%)	2,86	2,88	2,91	2,93
				Persentase pemenuhan sarana pelatihan BLK (%)	0	0	50	70
			Sasaran 1.3	Terwujudnya daya saing Infrastruktur				
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan yang ditangani (%)	63,56	65,03	66,56	68,58
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kondisi baik (Bendungan) (%)	45,45	54,54	63,64	72,73
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	86,87	87,44	88,43	89,56
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase sarana dan prasarana Sampah (%)	25	0	50	75
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses limbah domestik layak (%)	72,14	72,18	72,27	72,35
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan prasarana transportasi darat dalam kondisi baik (%)	52	44	38	32
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayanan	Persentase peningkatan prasarana transportasi laut dalam kondisi baik (%)	30,5	25,5	20,5	15,5

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
2	10	05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah pemda yang difasilitasi (%)	66,67	66,67	66,67	66,67
2	16	03	Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan jaringan intra pemerintah (%)	76,22	84,42	83,62	100
			Tujuan 2	Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan				
			Sasaran 2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata				
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	13,26	16,33	19,40	22,47
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	100
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan rumah layak huni (%)	91,99	92,24	92,97	93,82
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan PSU (%)	0,8	1,6	2,4	3,2
			Sasaran 2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup				
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase laporan kualitas lingkungan hidup (%)	75	75	75	75
				Cakupan daerah yang dikonservasi (%)	25	50	75	100
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah (%)	99	99	99	100
				Persentase pengurangan sampah (%)	0,27	0,28	0	0,3
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap penataan ruang (%)	60	100	100	100
			Tujuan 3	Terwujudnya Manusia dan masyarakat yang berkualitas				
			Sasaran 3.1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat				
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD (%)	57	58	59	60
				APM PAUD (%)	57	59	62	65
				APK SD (%)	97	98	99	100
				APM SD (%)	89	89	90	90
				APK SMP (%)	96	97	99	100
				APM SMP (%)	67	68	69	70

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Penurunan Buta Huruf (%)	46	44	42	40
				Angka DO (%)	1,20	1,17	1,13	1,10
				Angka Melanjutkan Pendidikan SD ke SMP (%)	100	100	100	100
				Angka Melanjutkan Pendidikan SMP ke SMA(%)	100	100	100	100
				Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik (%)	26,11	29,83	33,57	37,29
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100
				Angka Kelulusan SMP/MTS (%)	100	100	100	100
				Presentasi PAUD Terakreditasi B (%)	22,85	23,94	25,02	26,11
				Persentase SD terakreditasi minimal B (%)	50,72	52,50	54,29	56,07
				Persentase SMP terakreditasi minimal B (%)	54,68	57,8	60,92	64,04
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi (%)	81,29	81,53	81,76	82,00
Sasaran 3.2			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat					
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan PHBS (%)	57	59	61	63
				Cakupan Penanganan penyakit menular (%)	93,3	93,3	95	95
				Cakupan Penanganan penyakit tidak menular (%)	82,5	83,7	85	86,2
				Persentase puskesmas yang terakreditasi utama (%)	33,29	52,29	71,29	90,29
				Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar (%)	67,7	72,8	76,4	80
				Angka Gizi Buruk (%)	0,3	0,2	0,1	0,1
				Cakupan Desa/Kelurahan STBM	60,8	67,2	73,6	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	97	98
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standard (%)	100	100	100	100

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai Standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut sesuai standard (%)	100	100	100	100
				Cakupan Pelayanan Vaksin Covid-19 (%)	75	85	95	100
				Persentase Penduduk yang memperoleh Jaminan Kesehatan (%)	60	65	70	75
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan maskin	17,75	17,17	16,59	16
				Presentase penerapan SOP (%)	85	85	90	90
				Cakupan Pemulihan Kesehatan (%)	89,21	89,47	89,74	90
				Cakupan Penerapan Sistem Informasi kesehatan secara terintegrasi (%)	46	64	82	100
				Cakupan Mutu Pelayanan RS	86,43	87,62	88,81	90
				Persentase sarana/ prasarana RS dalam kondisi baik (%)	77,12	78,08	79,04	80
				Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (%)	94	96	97	98
				Persentase penduduk yang memperoleh jaminan kesehatan (%)	60	65	70	75
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan pengawasan obat dan makanan (%)	15,99	20,66	25,33	30,00
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa yang menerapkan PERDES KIBBLA (%)	6,8	11,2	15,6	20
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	10	15	20	25
					20	20	20	20

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
Sasaran 3.3			Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB					
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)	53,63	54,75	55,87	57,00
				Cakupan Akseptor Baru (%)	62,00	65,00	68,00	70,00
Sasaran 3.4			Meningkatnya kesejahteraan sosial Masyarakat					
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase anak terlantar yang ditangani (%)	13,26	16,33	19,40	22,47
				Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan (%)	100	100	100	100
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas (%)	53,06	60,06	67,06	74,06
Sasaran 3.5			Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak					
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perempuan yang berpartisipasi di sektor publik (%)	46,00	47,00	47,5	48,00
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)	0,001	0,001	0,001	0,001
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,02	0,02	0,01	0,01
				Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)	8	12	16	20
Sasaran 3.6			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah					
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	10,99	21,98	32,97	43,96
				Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri (%)	1,7	3,4	5,1	6,8
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase fasilitas olahraga yang memenuhi standar (%)	8	16	24	32
Tujuan 4			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran 4.1			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public					
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan penerapan SPM sesuai standar (%)	100	100	100	100

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
x	xx	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penerapan SOP sesuai standar (%)	100	100	100	100
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP (%)	100	100	100	100
				Rasio penduduk ber-KK (%)	100	100	100	100
				Rasio Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA (%)				
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Rasio penduduk ber- AKTA Kelahiran (%)	42,89	63,38	61,13	54,19
				Rasio penduduk ber- AKTA Nikah (%)	22,79	24,97	26,17	77,93
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase fasilitasi pelayanan perizinan (%)	89	93	96	100
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang memiliki sertifikat fungsional sesuai jabatan (%)	14,68	18,45	22,22	26,00
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki sertifikat penjenjangan sesuai jabatan (%)	14,68	18,45	22,22	26,00
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD (%)	5,76	6,29	6,81	7,30
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan (%)	55,00	60,50	66,55	73,05
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	13,75	15,13	16,64	18,15
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut LHP (%)	75,00	77,00	78,25	80,00
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perentase Keterlibatan Lembaga Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat (%)	100	100	100	100
2	16	02	Program Informasi dan Komunikasi Publik.	Cakupan layanan media komunikasi dan Informasi publik (%)	40	40	40	41
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD (%)	100	100	100	100

KODE			TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Satuan)	TARGET KINERJA			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM			2023	2024	2025	2026
				Persentase realisasi program RPJMD ke dalam RKPD yang diakomodir dalam APBD (%)	100	100	100	100
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase konsistensi program kegiatan RPJMD ke Renstra dan RKPD ke Renja (%)	100	100	100	100
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kasus sosial yang ditangani (%)	11,50	11,75	12,00	12,00
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus kriminal yang ditangani (%)	60	60	60	60
				Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (%)				
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penurunan Resiko Bencana (%)	66,67	77,78	88,89	100
				Persentase Cakupan Penanganan Bencana (%)	75,78	83,85	91,93	100
				Persentase Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	16,79	17,79	18,79	19,79
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan dan penanganan sosial korban bencana (%)	100	100	100	100
				Persentase desa/ kelurahan siaga bencana (%)	1,2	1,2	1,2	1,2
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Penelitian yang dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	1	1
				Jumlah Inovasi yang dihasilkan (dokumen)	3	3	3	3
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDES aktif (%)	46,72	51,97	57,21	62,45
				Persentase Peningkatan Desa Tertib Administrasi (%)	79,04	74,67	70,31	65,9
				Persentase Aparatur Desa yang di Tingkatkan Kapasitasnya (%)				

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Flores Timur ditetapkan melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026.

Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Flores Timur

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
1	Terwujudnya Daya Saing Daerah	% Pertumbuhan Ekonomi	Indeks pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui laju pertumbuhan PDRB dengan cara menghitung PDRB tahun pengamatan di kurangi dengan PDRB tahun pengamatan sebelumnya di bagi PDRB tahun pengamatan sebelumnya di kali seratus persen	$\frac{\text{PDRB (t + 1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$ Dimana : (t + 1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB sebelumnya	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Peternakan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
1.1	Terwujudnya Daya Saing Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Indeks pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui laju pertumbuhan PDRB dengan cara menghitung PDRB Tahun Pengamatan di kurangi dengan PDRB tahun pengamatan sebelumnya di bagi PDRB tahun pengamatan sebelumnya di kali seratus persen	$\frac{\text{PDRB (t + 1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100 \%$ Dimana : (t + 1) = Tahun Pengamatan PDRB T = Tahun Pengamatan PDRB sebelumnya	Dinas perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan Dan Peternakan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Laju Inflasi Daerah	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember).	$\left[\frac{1 + \Delta \text{Inf}1 + \Delta \text{Inf}2 + \Delta \text{Inf}t}{1/t} - 1 \right]$ Dimana : ΔInf = perubahan inflasi dari nilai tahun Sebelumnya. t = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\frac{\Delta \text{Inf} = \text{Inf (n + 1)} - \text{inf (n)}}{\text{Inf (n)}} \times 100 \%$ Dimana : Inf (n) = nilai inflasi pada tahun n Inf n + 1 = nilai pada 1 tahun berikutnya n = tahun ...	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi year-on-year September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).		
		Indeks Desa Membangun	Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa. Pengukuran IPD dibangun dari data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) digunakan sebagai rujukan indikator-indikator utama penyusun indeks melalui komponen penyusunnya. IPD dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi pembangunan desa yang mencakup 5 dimensi yang menggambarkan ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat desa dengan memperhatikan berbagai kondisi yang digambarkan pada setiap indikator, maka pemerintah daerah dan pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan, yaitu dengan memberikan prioritas dan seleksi pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat terkait indikator yang masih rendah kualitasnya serta yang dianggap perlu.	$Ix = \frac{\sum_{1}^{N} \text{Skor } x}{N \times X \ 5}$ Dimana: I_x = Indeks N = Jumlah Indikator	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah merupakan angka yang mengukur selisih nilai realisasi investasi (tahun	Nilai investasi yang dicapai	Dinas Penanaman Modal dan

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap nilai realisasi investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.		Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1.2	Terwujudnya Daya saing Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Tingkat Kemantapan Jalan + Indeks Kinerja Sistem Irigasi + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum Aman + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Sanitasi Layak dan Aman + Ketaatan RT RW / 5	Tingkat Kemantapan Jalan + Indeks Kinerja Sistem Irigasi + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Air Minum Aman + Persentase Rumah Tangga yang Terakses Sanitasi Layak dan Aman + Ketaatan RTRW / 5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Terwujudnya Pembangunan Yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	Indeks Gini (Poin)	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva Lorenz, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif	$G = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: P_i = persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Q_i = persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: □ $G < 0,3$ = ketimpangan rendah □ $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang □ $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
			pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva Lorenz. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.		
2.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan makmur	Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.	$P_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{z - y_i}{z}$ a I-1 dimana: $\alpha = 0$ Z = garis kemiskinan. Y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = Banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk.	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sangat Baik = $90 \leq x \leq 100$ Baik = $70 \leq x < 90$ Sedang = $50 \leq x < 70$ Kurang = $25 \leq x < 50$ Sangat Kurang = $0 \leq x < 25$	IKLH Provinsi dengan Ekosistem Gambut $IKLH = (0,3400 \times IKA) + (0,4280 \times IKU) + (0,1040 \times IKTL) + (0,0209 \times IKEG) + (0,099 \times IKAL)$	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
				IKLH Provinsi tanpa EKosistem Gambut $\text{IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,4280 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKTL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ IKLH Provinsi tanpa Laut dengan EKosistem Gambut $\text{IKLH} = (0,3760 \times \text{IKA}) + (0,4050 \times \text{IKU}) + (0,1712 \times \text{IKTL}) + (0,0478 \times \text{IKEG})$	
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut: Indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup.	$\text{IPM} = 1/3 [\text{X}(1) + \text{X}(2) + \text{X}(3)]$ Dimana: X(1) : Indeks harapan hidup X(2) : Indeks pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$(indeks rata rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak Indeks $\text{X}(i) = \frac{\text{X}(i) - \text{X}(i)_{\min}}{\text{X}(i)_{\max} - \text{X}(i)_{\min}}$ Dimana: X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i) X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)	Laporan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berjalan
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	rata-rata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang	$\text{Rata-rata Lama Sekolah} = \frac{1}{P15+} \sum \text{Xi}$	Survei Sosial Ekonomi Nasional

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
	Masyarakat		pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas	$I=1$ Dimana P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke - i	(Susenas), Badan Pusat Statistik

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.	$\text{Harapan Lama Sekolah} = \frac{\sum_{i=7}^n FK \cdot E_i}{P}$ Dimana FK = Faktor koreksi pesantren E = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7,8,...,n)	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Badan Pusat Statistik
3.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	$\text{Jumlah Umur Kematian} / \text{Jumlah Kematian} \times 100$	Laporan OPD
3.3	Meningkatnya Kualitas pengendalian Penduduk dan layanan KB	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	diketahuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya.	$TFR = 5 \sum_{i=1}^{ASFR} ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ Dimana TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok	Laporan BPS dan Laporan OPD

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
				umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, I = 2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49) K = bilangan konstanta biasanya 1000	
3.4	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.	$TPT = PP/PAK \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka PP = Jumlah Pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
3.5	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan salah satu indeks yang setiap tahun dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat keberhasilan Pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$	Survei BPS Indeks Pembangunan Gender
3.6	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda yang mencakup nilai => Pendidikan => Kesehatan dan Kesejahteraan => Lapangan dan Kesempatan Kerja => Partisipasi dan Kepemimpinan => Gender dan Diskriminasi	$IPP = (\text{Indeks Domain 1} + \text{Indeks Domain 2} + \text{Indeks Domain 3} + \text{Indeks Domain 4} + \text{Indeks Domain 5}) / 5$	IPM KEMENPORA
4	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks RB	dalam perhitungan nilai RB memiliki 2 komponen yaitu RB General dan RB Tematik dengan masing-masing bobot : RB General = 100 dan RB Tematik = 20	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Bagian Organisasi
4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dalam perhitungan nilai IKM di perlukan total dari nilai persepsi Per Unsur dan Total Unsur Terisi dan dikali Nilai Penimbang Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka	$\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur} \times \text{Total unsur yang terisi}$	Bagian Organisasi

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI				DEFINISI OPERASIONAL			SUMBER DATA
							FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN			
			hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit Pelayanan x 25				Dimana : Bobot nilai rata-rata Jumlah Bobot 1 Terbilang Jumlah Unsur 14			
			Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan				
			1.	1,00-1,75	25-43,75	D				
			2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C				
			3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B				
			4.	3,26-4,00	81,26-100	A				
					Nilai SAKIP	Dalam perhitungan nilai SAKIP 4 komponen yang dinilai yaitu komponen perencanaan kinerja dengan bobot 30, komponen pengukuran kinerja dengan bobot 30, komponen pelaporan kinerja dengan bobot 15 dan komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25 sehingga dapat dikalkulasikan nilai hasil Evaluasi Yaitu dengan Bobot 100				

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
		Indeks SPBE	Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan metode: 1. Evaluasi dokumen, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan dokumen yang berisi jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung; 2. Wawancara, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan tanya jawab; 3. Observasi lapangan, yaitu melakukan penilaian tingkat kematangan SPBE berdasarkan pengamatan langsung	Hasil Evaluasi KemenPANRB	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	METODOLOGI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
				FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	
4.2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin antikorupsi. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.	Hasil Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK)	Inspektorat
		Opini BPK	BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion)	Hasil Opini BPK	Badan Keuangan

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Tingkat Kabupaten Dilakukan 2 Kali Perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Penjabat Bupati Flores Timur pada bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2024. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah

1. Penyusun kembali perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Flores Timur yang berdampak dari Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 sehingga di buatlah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
2. Penyusun kembali Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 menggantikan Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Flores Timur Tahun 2019-2023. dengan melakukan penyesuaian Kembali Indikator Kinerja yang awalnya sebanyak 111 Indikator menjadi 42 Indikator
3. Penyesuaian target menjadi lebih rendah, karena target yang sebelumnya tidak realistis (sangat jauh dari realisasi tahun 2024, dan sumber daya tidak banyak berbeda dibandingkan tahun sebelumnya)

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur: Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

Adapun Perubahan / Revisi 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya daya Saing Daerah	% Pertumbuhan Ekonomi	%	4,61
1.1	Terwujudnya daya saing Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	4,61
		Laju Inflasi Daerah	%	0,45
		Indeks Desa Membangun	Poin	100
		Nilai Investasi Daerah	Rupiah	34.323.337.329
1.2	Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Poin	28,87
2	Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan	Indeks Gini (Poin)	Poin	0,312
2.1	Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan makmur	Tingkat Kemiskinan	%	9,85
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,81
3	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas	Indeks Pemabngunan Manusia	Poin	65,4
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidika Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,36
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,96

3.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,9
3.3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	%	3
3.4	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,31
3.5	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,16
3.6	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	Indeks Pemabngunan Daerah	Poin	53,99
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB	Poin	58,17
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	76,14
		Nilai SAKIP	Poin	59,12
		Indeks SPBE	Poin	2,21
4.2	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	Poin	91,14
		Opini BPK	Poin	WDP

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2024

No .	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Terwujudnya Daya Saing Daerah			
	<i>Sasaran 1.1 : Terwujudnya daya saing Ekonomi</i>		
	Program Penyuluhan Pertanian	548.657.399	APBD
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	499.999.949	APBD
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	270.866.800	APBD
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	109.998.352	APBD
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	189.999.234	APBD
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	59.784.406	APBD
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	40.495.705	APBD
	Program Promosi Penanaman Modal	34.988.250	APBD
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	893.875.000	APBD
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	120.000.000	APBD
	Program Pemasaran Pariwisata	247.000.000	APBD
	Program Administrasi Pemerintah Desa	275.013.372	APBD

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	608.552.680	APBD
	Sasaran 1.2 : Terwujudnya Daya Saing Infrastruktur		
	Program Penyelenggaraan Jalan	33.264.838.490	APBD
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.898.415.990	APBD
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.315.426.549	APBD
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	8.277.696.580	APBD
2. Terwujudnya Pembangunan yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan			
	Sasaran 2.1 : Terpenuhiya Kebutuhan Dasar Masyarakat Secara Adil dan Merata		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (Anak Terlantar yang ditangani)	303.440.698	APBD
	Sasaran 2.2 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		
	Program Kawasan Permukiman	1.962.299.860	APBD
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	400.000.000	APBD
3. Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas			
	Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat		
	Program Pengelolaan Pendidikan	139.245.191.950	APBD

	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	134.641.650	APBD
	Sasaran 3.2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinkes)	109.266.103.900	APBD
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	443.992.740	APBD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	185.632.000	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Dinkes)	8.384.671.186	APBD
	Sasaran 3.3 : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.306.013.559	APBD / DAU - DAK
	Sasaran 3.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pemenuhan Hak Anak (PHA)	49.998.930	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	603.495.880	APBD
	Sasaran 3.5 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	74.999.086	APBD
	Program Perlindungan Perempuan	70.000.000	APBD

	Sasaran 3.6 : Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	399.995.561	APBD
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.843.449.330	APBD
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
	Sasaran 4.1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	42.150.260	APBD
	Program Penunjang Pemerintah Urusan Daerah dan Kabupaten	14.569.258	APBD
	Program Kepegawaian Daerah	328.027.254	APBD
	Program Pengembangan SDA	144.714.950	APBD
	Program Pelayanan Penanaman Modal	85.159.525	APBD
	Program Pendaftaran Penduduk	740.306.000	APBD
	Program Pencatatan Sipil	121.596.100	APBD
	Sasaran 4.2 : Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1.825.795.400	APBD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	875.085.116	APBD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.033.476.818	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	265.277.703.902	APBD

	Program Penyelenggaraan Pengawasan	560.974.940	APBD
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	438.996.770	APBD
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa	1.063.741.619	APBD
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.323.477.723	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2023 – 2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam RPD terdapat 4 Tujuan, 16 Sasaran, dengan 42 Indikator Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024, yaitu:

1. Terwujudnya daya saing daerah
2. Terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang berkualitas
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik

Kinerja Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Penjabat Bupati Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Penjabat Bupati merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode RPD Kabupaten Flores Timur 2023-2026.

Hasil pengukuran capaian kinerja telah disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	Lebih dari 100 %	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75 % s.d 100 %	Baik (B)
3	55 % s.d 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 98,58 dengan nilai Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja kategori **Baik Sekali** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Tujuan 1 Terwujudnya daya Saing Daerah					
No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	0.55	4,61	2,69	58,35
Sasaran Strategi 1.1 Terwujudnya daya saing Ekonomi					
1.1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	0.55	4,61	2,69	58,35
1.1.2	Laju Inflasi Daerah (Point)	-2,02	0,45	2,65	18,00
1.1.3	Indeks Desa Membangun (Point)	24 Desa Tertinggal	100	100	100
1.1.4	Nilai Investasi Daerah	Rp.13.201.28 3.588	Rp.34.323.3 37.329.00	Rp.79.994.65 1.629.00	233.06
Sasaran Strategi 1.2 Terwujudnya daya saing Infrastruktur					
1.2.1	Indeks Infrastruktur	-	28,87	72,96	252,72
Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan					
2.	Indeks Gini (Poin)	0,33	0,312	0,287	91,99
Sasaran Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
2.1.1	Tingkat Kemiskinan	10,19	9,85	11.25	83,64
Sasaran Strategi 2.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup					
2.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	69,29	68,81	72,58	103,97
Tujuan 3 Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas					
3.	Indeks Pembangunan Manusia	65,00	65,40	66,29	101,36
Sasaran Strategi 3.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat					
3.1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,04	8,36	8,06	96,41

3.1.2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,95	13,96	12,96	92,84
Sasaran Strategi 3.2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					
3.2.1	Angka Harapan Hidup	65,50	65,90	66,21	100,47
Sasaran Strategi 3.3 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB					
3.3.1	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,2	3	2,20	73,33
Sasaran Strategi 3.4 Menurunnya Pengangguran					
3.4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	3,31	3,73	112,69
Sasaran Strategi 3.5 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender					
3.5.1	Indeks Pembangunan Gender	3,20	93,16	91,97	98,72
Sasaran Strategi 3.6 Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah					
3.6.1	Indeks Pembangunan Pemuda	-	53,99	54,33	100,63
Tujuan 4 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
4	Indeks RB	48,44	58,17	56,47	97,08
Sasaran Strategi 4.1 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
4.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,18	85,86	84,12	97,97
4.1.2	Nilai SAKIP	52,00	59,12	60,10	101,66
4.1.3	Indeks SPBE	-	2,21	2,10	95,02
Sasaran Strategi 4.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					
4.2.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	Poin	91,14	N/A	0
4.2.2	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	100

Berdasarkan hasil pengukuran 22 Indikator kinerja dari 23 Indikator Kinerja Utama pada tabel di 3.2 dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 12 indikator; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

3.2 Analisis Capaian

Tabel 3.3

Tujuan 1 Terwujudnya daya Saing Daerah

Capaian indikator Tujuan Terwujudnya 1 daya Saing Daerah, adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertumbuhan Ekonomi	0.55	4.61	2,69	58,35

1. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 3.3 nilai capaian indikator Pertumbuhan Ekonomi yaitu 58,35% dengan nilai target 4,61 dan nilai realisasi 2,69. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Flores Timur dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti laju pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), inflasi, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Flores Timur mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, secara umum, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini cenderung meningkat.

Beberapa sektor yang menjadi andalan perekonomian Kabupaten Flores Timur adalah:

- Sektor Pertanian: Kabupaten Flores Timur memiliki potensi pertanian yang besar, terutama dalam produksi jagung, padi, dan kacang-kacangan.
- Sektor Perikanan: Kabupaten ini memiliki garis pantai yang panjang dan berpotensi besar dalam produksi perikanan.
- Sektor Pariwisata: Kabupaten Flores Timur memiliki beberapa objek wisata alam yang indah, seperti pantai, gunung, dan danau.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Flores Timur perlu memperhatikan beberapa faktor, seperti:

- **Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa.
- **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi kabupaten.
- **Regulasi dan Kebijakan:** Meningkatkan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti perizinan yang mudah dan biaya yang rendah, dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

■ **Masalah/ kendala yang di hadapi**

Berikut beberapa masalah yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur:

1. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, dapat menghambat aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa;
2. Sektor pertanian masih menjadi andalan perekonomian Kabupaten Flores Timur, namun ketergantungan pada sektor ini dapat membuat ekonomi kabupaten rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca;
3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan sehingga sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri;
4. Kurangnya dukungan kebijakan yang dapat membuat program pembangunan ekonomi tidak efektif dan tidak efisien.

■ **Solusi**

Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Flores Timur:

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.
2. Meningkatkan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain, seperti pariwisata, industri, dan jasa.
3. Meningkatkan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia.
4. Meningkatkan dukungan kebijakan untuk program-program pembangunan ekonomi.
5. Meningkatkan pengembangan sistem informasi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ekonomi

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
4. Mengembangkan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran dan teknis.
5. Melakukan evaluasi kinerja program pengembangan infrastruktur, dan sumber daya manusia

Perbandingan realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%)
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pertumbuhan Ekonomi	1,73	3,18	2,69

Berdasarkan Tabel 3.4 Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami penurunan nilai dengan selisih 0.49

Tabel 3.5

Sasaran Strategi 1.1
Terwujudnya daya saing Ekonomi

Capaian indikator sasaran 1.1 “Terwujudnya daya saing Ekonomi” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	0.55	4,61	2,69	58,35
1.1.2	Laju Inflasi Daerah (Point)	-2,02	0,45	2,65	16,98
1.1.3	Indeks Desa Membangun (Point)	24 Desa Tertinggal	100	100	100
1.1.4	Nilai Investasi Daerah	Rp.13.201.283.588	Rp.34.323.337.329.00	Rp.79.994.651.629.00	233.06

1.1.1. Pertumbuhan PDRB (%)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan pendekatan lapangan usaha. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambahan bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Hasil capaian Skor Pertumbuhan PDRB (%) pada tabel 3.5 adalah 58,35% Skor ini merupakan hasil validasi dari nilai target 4,61 dan realisasi 2,69.

■ Masalah/ Kendala yang di Hadapi

Pada tahun 2023, tidak ada permasalahan pada indikator ini karena dilihat dari kunjungan ke laman web meningkat dan selain itu masih ada juga kunjungan langsung di BPS yang semakin meningkat.

■ Solusi

Menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu melalui pendekatan lapangan usaha dimana berfokus pada seluruh komponen nilai tambahan bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong upaya optimalisasi semua potensi penerimaan daerah melalui optimalisasi sektor-sektor yang memungkinkan peningkatan PAD.
2. Mendorong kesadaran masyarakat untuk berani memanfaatkan jasa perbankan dalam pengembangan usaha mikro.
3. Pemerintah harus dapat mendorong belanja-belanja yang lebih mengarah pada sektor yang berkontribusi lebih bagi pertumbuhan PDRB daerah (sektor pertanian, perkebunan, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan koperasi).

Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%)
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Pertumbuhan PDRB (%)	1,73	3,18	2,69

Berdasarkan Tabel 3.6 perbandingan realisasi Pertumbuhan PDRB (%) dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan.

1.1.2. Laju Inflasi Daerah (Poin)

Pada Tabel 3.5 Nilai Capaian indikator Laju Inflasi Daerah Kabupaten adalah 16,98 dari nilai target 0,45 dan realisasi 2,65. Flores Timur tidak termasuk dalam kota yang menjadi basis perhitungan inflasi, sehingga perhitungan inflasi menggunakan pendekatan perhitungan Kota Maumere Kabupaten Sikka. Data inflasi 3 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi Laju Inflasi Daerah (Point)
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Laju Inflasi Daerah (Point)	6,25	3,33	2,65

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Sasaran Inflasi dimana batas angka inflasi tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tiga tahun yaitu :

1. Periode tahun 2022 dengan batas inflasi 3 % ($\pm 1\%$)
2. Periode tahun 2023 dengan batas inflasi 3 % ($\pm 1\%$)
3. Periode tahun 2024 dengan batas inflasi 2,5 % ($\pm 1\%$)

Angka inflasi (pendekatan perhitungan Kota Maumere) menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi kenaikan inflasi yakni mencapai angka 6,25% (YoY), jauh diatas rentang batas inflasi yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2022 yakni 3% ($\pm 1\%$). Tingginya angka inflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah terjadi kenaikan harga barang yang ditentukan oleh pemerintah (administered prices) yakni BBM jenis pertalite yang naik sebesar 30,72 %, solar naik sebesar 32,04 % dan pertamax naik sebesar 16% pada bulan September 2022. Selain itu kenaikan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa terutama makanan dan transportasi khusus pada musim liburan sekolah dan menjelang Hari Raya Natal 2021.

Pada tahun 2022, inflasi menurun pada angka 3,33 % (YoY) dimana angka ini tentunya lebih rendah jika dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2022. Penyumbang angka inflasi ini diantaranya adalah perubahan harga kelompok

makanan dan minuman serta meningkatnya permintaan jasa penerbangan menjelang liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023.

Angka inflasi kembali turun pada tahun 2023 yakni 2,65% (Y0Y), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,02 %, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%. Selain itu kelompok pendidikan menyumbang inflasi sebesar 0,16%, kelompok penyediaan makanan & minuman restoran sebesar 0,28% serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08%.

■ **Masalah/ kendala yang di hadapi**

- a. Masih tingginya tingkat ketergantungan pasokan bahan - bahan kebutuhan pokok dari wilayah diluar Kabupaten Flores Timur
- b. Panjangnya rantai distribusi dan kesenjangan informasi antar pelaku usaha menyebabkan harga barang dipasar menjadi tidak efisien. Sebagai contoh, tidak adanya informasi terkait sistem penyaluran minyak goreng khusus “minyak kita” sehingga pedagang menjual sesuai harga perolehan barang yang ditambah dengan pengeluaran lainnya seperti biaya angkut sehingga saat ini harga “minyak kita” dijual dipasaran dengan harga yang jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
- c. Produktivitas pangan dimana kondisi iklim dan cuaca yang cenderung berubah-ubah disebagian besar wilayah Kabupaten Flores Timur yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah dan produktivitas pangan.

■ **Rencana Aksi**

1. Mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah pada tingkat Kabupaten agar dapat bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Mengaktifkan Satgas pangan di daerah yang bertugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Pemerintah;
3. Melakukan gerakan tanam pangan cepat panen;
4. Intensifkan jaringan pengaman sosial;
5. Menjaga Distribusi bahan pangan/stabilisasi harga

1.1.3. Indeks Desa Membangun (Poin)

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa dari semua aspek dan juga pendampingan pengelolaan Dana Desa secara maksimal berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan Desa, sehingga di tahun 2024 sudah

tidak ada lagi Desa dengan kategori tertinggal di Kabupaten Flores Timur dimana pada awal tahun perencanaan tahun 2021 masih ada 24 Desa dengan kategori tertinggal. Sehingga nilai cakupan Tahun 2024 100 %. Walaupun sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal tetapi masih ada banyak persoalan yang dihadapi untuk peningkatan kinerja ke depannya dan rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Utama .

■ **Masalah/kendala :**

- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi khususnya pada kegiatan prioritas yang mendukung tingkat capaian kinerja yang maksimal.
- Terbatasnya kualitas aparatur pemerintah desa baik dalam aspek SDM maupun pelaku pengelola kelembagaan lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDES), pelaku wirausaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di desa .

■ **Solusi :**

- Penyediaan anggaran yang maksimal setiap tahunnya sesuai indikator output kinerja yang telah ditetapkan agar dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan juga untuk kesinambungan kegiatan pendampingan, evaluasi dan monitoring agar keberhasilan program- program/kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan yang berdampak pada perubahan status Desa yang berdampak pada Peningkatan IDM (Indeks Desa Membangun).
- Meningkatkan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Bimtek) bagi Aparat pemerintah desa, pelaku pengelola lembaga pemberdayaan masyarakat (BUMDES), pelaku wirausaha di desa.

■ **Rencana Aksi**

Dengan realisasi Indeks Desa Membangun yang sudah sesuai target, kedepannya diperlukan komitmen bersama untuk lebih meningkatkan upaya koordinasi, pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi untuk pencapaian tujuan yang selanjutnya yaitu peningkatan status **Desa Mandiri**.

Untuk Perkembangan Desa dan Perubahan Status Desa dari awal tahun perencanaan tahun 2027 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8

Progres Indeks Desa Membangun

Data Awal 2021	Jumlah (Desa)	STATUS IDM		
		Status IDM 2022	Status IDM 2023	Status IDM 2024
Desa Tertinggal	24	2	1	0
Desa Berkembang	166	109	80	55
Desa Maju	36	110	131	140
Desa Mandiri	3	8	17	34
TOTAL	229	229	229	229

Progres perkembangan IDM dari tahun ke tahun sangat memuaskan. Dari data awal tahun 2021 dengan total 24 Desa Tertinggal di tahun 2023 total Desa Tertinggal di Kabupaten Flores Timur tersisa 1 Desa dan pada tahun 2024 sudah tidak ada lagi Desa dengan kategori tertinggal atau 100 %. Dapat dijelaskan bahwa dari 24 Desa Tertinggal sudah berubah statusnya menjadi Desa Berkembang dan Desa Maju dari rentang waktu dari tahun 2021 sampai tahun 2024 dengan persentasi capaian kinerja seperti dijelaskan di atas.

Untuk kategori Desa Mandiri di Tahun 2021 dari 3 Desa meningkat menjadi 34 Desa di tahun 2024. Dengan adanya pendampingan-pendampingan dari semua aspek secara berkesinambungan sehingga capaian kinerja selanjutnya di fokuskan pada peningkatan status Desa Mandiri.

1.1.4. Nilai Investasi Daerah

Dari tabel 3.5 dapat dilihat bahwa nilai investasi daerah pada tahun 2024 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar **Rp.34.323.337.329**, realisasi yang dicapai sebesar **Rp.79.994.651.629** dengan nilai capaian sebesar 233,06%

■ Masalah / kendala yang dihadapi

Masih banyak pelaku usaha yang belum mengerti serta lalai dalam melakukan pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

■ Strategis

Melaksanakan Bimtek serta peningkatan pengawasan.

■ Rencana Aksi

Melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha mengenai tata cara pengisian LKPM. Hal ini diperlukan karena ditemukan masih banyak pelaku

usaha yang belum memahami tentang tata cara pengisian LKPM. Serta melakukan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha karena banyak ditemukan pelaku usaha yang lalai dalam melakukan pelaporan LKPM tersebut.

Tabel 3.9	Perbandingan realisasi Indeks Nilai Investasi Daerah tahun 2022 s.d 2024		
Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Nilai Investasi Daerah	13.201.283.588	83.603.189.558	25.510.412.279

Berdasarkan tabel 3.9, perbandingan nilai investasi daerah dari tahun 2022 s/d 2024 sempat mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pelaku usaha akibat dampak panjang dari pandemic Covid 19 serta kurang disiplinnya pelaku usaha dalam melakukan pelaporan LKPM.

Tabel 3.10	Tujuan 1 Terwujudnya Daya Saing Daerah Sasaran Strategi 1.2 Terwujudnya daya saing Infrastruktur		
------------	--	--	--

Capaian indikator sasaran 1.2 “Terwujudnya daya saing Infrastruktur” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.2.1	Indeks Infrastruktur	-	28,87	72,96	252,72

1.2.1. Indeks Infrastruktur (Point)

Pada tabel 3.10 menyatakan nilai capaian indikator ialah 252,72, dengan nilai target 28,87 dan realisasi 72,96. Infrastruktur dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Mulai dari jalan dan jembatan untuk transportasi, penyediaan air dan listrik untuk kebutuhan hidup, sampai peraturan lalu lintas dan pelayanan publik sebagai sistem untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Meskipun penting, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih mengalami berbagai masalah. Masalah-masalah ini yang menghambat infrastruktur belum tersedia secara merata di Kabupaten Flores Tmur. Adapun, masalah-masalah pembangunan infrastruktur di Indonesia berkaitan dengan hal-hal berikut;

■ **Masalah/kendala :**

- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah dalam membangun Kabupaten Flores Timur sehingga sering timbul percek-cokan/ penolakan dari masyarakat;
- Dana serta sumber daya yang dialokasikan pemerintah untuk daerah perbatasan dan pedalaman biasanya lebih rendah sebab biaya yang lebih besar disalurkan untuk pembangunan di daerah yang padat penduduk dan lebih berkembang. Langkah pemerintah yang kurang menyalurkan investasi ke daerah-daerah pedalaman membuat pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan sebanyak di daerah-daerah padat penduduk.
- Pembangunan infrastruktur dapat terhambat akibat ketersediaan sumber daya alam seperti air, lahan, hingga energi yang terbatas. Akan sulit melakukan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Flores Timur;
- Perencanaan dan penyiapan proyek yang berkontribusi masih minim dalam masalah pembangunan infrastruktur
- Permasalahan dalam pembangunan infrastruktur harus diatasi agar pembangunan bisa lebih merata.

Untuk mengatasi masalah tersebut, berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan.

■ **Solusi :**

- Membangun kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembebasan lahan dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses tersebut.
- Koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik antar lembaga dapat memperlancar pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur. Koordinasi juga membuat antar lembaga tidak saling mengalami konflik kepentingan;
- Selain koordinasi yang baik antar lembaga, pembangunan infrastruktur juga membutuhkan perencanaan yang matang. Tak hanya terkait masalah teknis, namun juga pembiayaan untuk infrastruktur yang akan dibangun;
- Perawatan terhadap infrastruktur yang sudah ada perlu dilakukan dengan baik. Dengan demikian, akan mengurangi pengeluaran negara untuk menangani masalah infrastruktur di Kabupaten Flores Timur.

■ Rencana Aksi

Selain solusi perlu adanya tindak lanjut / rencana aksi untuk mendukung indikator, berikut adalah rencana aksi yang akan dilakukan:

- Perlu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pembebasan lahan dengan memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses tersebut;
- Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penyiapan proyek infrastruktur, serta meningkatkan kualitas dokumen proyek dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten;
- Mengintegrasikan aspek mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur, melalui program pelatihan dan sertifikasi yang terintegrasi.

Tabel 3.11

Perbandingan realisasi Indeks Infrastruktur (Point)
Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Infrastruktur	-	-	72,96

Pada tabel 3.11 Menyatakan bahwa indikator indeks infrastruktur di Kabupaten Flores Timur tidak dapat di ketahui.

Tabel 3.12

Tujuan 2
Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan

Capaian indikator Tujuan “Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Indeks Gini (Point)	0,33	0,312	0,287	91,99

2. Indeks Gini (Point)

Pada tabel 3.12 menyatakan nilai capaian indikator ialah 91,99%, dengan nilai target 0,312 dan realisasi 0,287. Indeks Gini adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk dalam suatu wilayah atau daerah. Indeks Gini Kabupaten Flores Timur dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di kabupaten tersebut.

■ Interpretasi Indeks Gini :

- Indeks Gini 0: Menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan pengeluaran penduduk, artinya semua penduduk memiliki pengeluaran yang sama.
- Indeks Gini 1: Menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran penduduk yang sangat tinggi, artinya hanya satu orang yang memiliki semua pengeluaran.
- Indeks Gini antara 0 dan 1: Menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pengeluaran penduduk, namun tidak sangat tinggi.

■ Masalah/kendala :

1. Pengeluaran penduduk yang tidak merata dapat mempengaruhi Indeks Gini .
2. Pendapatan penduduk yang tidak merata dapat mempengaruhi Indeks Gini .
3. Kualitas pendidikan yang tidak merata dapat mempengaruhi Indeks Gini .
4. Akses ke lapangan kerja yang tidak merata dapat mempengaruhi Indeks Gini .

■ Solusi :

1. Meningkatkan akses ke pendidikan dapat membantu mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk.
2. Meningkatkan akses ke lapangan kerja dapat membantu mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk.
3. Meningkatkan pengeluaran penduduk dapat membantu mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat membantu mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk.

■ Rencana Aksi

Berikut adalah rencana aksi untuk mengurangi Indeks Gini di Kabupaten Flores Timur:

1. Mengembangkan program pendidikan gratis bagi anak-anak miskin dan rentan.
2. Mengembangkan program pelatihan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan meningkatkan kualitas guru
4. Mengembangkan program bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat miskin dan rentan

Tabel 3.13

Perbandingan realisasi Indeks Gini (Point)
tahun 2021 s.d 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks Gini (Point)	0,295	0,294	0,287

Berdasarkan tabel 3.13 menyatakan bahwa indeks Gini mengalami penurunan pada 3 (tiga) tahun terakhir nilai Indeks pada indikator ini menggunakan nilai indeks pada tahun 2023.

Tabel 3.14

Sasaran Strategi 2.1
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.1.1	Tingkat Kemiskinan	10,19	9.85	11.25	83,64

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan tabel 3.14 nilai capaian Persentase (%) adalah 83,64% dengan target 9,85 dan realisasi 11,25. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 adalah 83,64%. Angka ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Rincian data kemiskinan di Kabupaten Flores Timur:

- Pada tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur adalah 11,14%

- Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur adalah 10,75%
- Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur adalah 11,77%
- Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 adalah 0,25

Di antara kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur berada di urutan ke-21 dalam hal persentase penduduk miskin. Kabupaten Sumba Tengah memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di provinsi ini, yaitu 30%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur telah mengadakan kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Flores Timur pada tanggal 13 Desember 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala dinas terkait, para camat, serta BUMD dan BUMN:

■ **Masalah/kendala :**

Berikut beberapa masalah terkait tingkat kemiskinan di Kabupaten Flores Timur:

1. Kualitas pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses ke sarana pendidikan sehingga membuat masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Ketergantungan masyarakat masih terbatas pada sektor pertanian yang menjadi andalan perekonomian Kabupaten Flores Timur, namun ketergantungan pada sektor ini dapat membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan cuaca.
3. Kurangnya lapangan kerja yang dapat membuat masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil.

Keterbatasan akses layanan kesehatan yang dapat menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih memadai.

■ **Solusi :**

1. Pengembangan pendidikan dan pelatihan yang dapat membuat masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
2. Pengembangan sektor ekonomi lain dapat membuat masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabil.
3. Pengembangan akses layanan kesehatan dapat membuat masyarakat mudah mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai.
4. Pengembangan program bantuan sosial dapat membuat masyarakat memiliki akses ke bantuan sosial yang memadai.

■ Rencana Aksi

Dengan realisasi Indeks Inflasi yang sudah sesuai target, kedepannya diperlukan:

1. Pengembangan program pendidikan gratis bagi anak-anak miskin.
2. Pengembangan program pelatihan kerja bagi masyarakat miskin
3. Pengembangan program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
4. Peningkatan kualitas hidup dengan mengembangkan infrastruktur yang memadai

Tabel 3.15

Perbandingan realisasi Tingkat Kemiskinan
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat Kemiskinan	10,75	11,77	11,25

Berdasarkan tabel 3.15 menyatakan bahwa Tingkat Kemiskinan mengalami peningkatan di tahun 2024.

Tabel 3.16

Sasaran Strategi 2.2
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	69,29	68,81	72,58	103,97

2.2.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Target yang ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. IKLH tahun 2024 ditetapkan target sebesar 68,81 poin. Realisasi IKLH Kabupaten Flores Timur tahun 2024 adalah 72,58 poin yang dikategorikan kedalam kriteria **Baik**. Tingkat capaian kinerja 104%.

Berikut perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Flores Timur dari tahun 2022 s/d 2024 :

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 s/d 2024

Indikator Sasaran	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	67,35 (sedang)	69,29 (sedang)	72,58 (Baik)

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur melaksanakan 2 program prioritas yaitu :

1. Program Pengendalian dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Persampahan

Selain itu ada beberapa program yang sangat penting yang berfungsi untuk menunjang pencapaian target sasaran antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah kabupaten/kota pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tahun 2024 nilai masing-masing indeks adalah sebagai berikut Indeks Kualitas Air (IKA)= 55 poin masuk pada kategori **sedang**; Indeks Kualitas Udara (IKU)= 93,11 masuk pada kategori **sangat baik**; dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)= 64,79 masuk kategori **sedang**.

Dari hasil IKLH tahun 2024 melalui Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor : S.276/ PPKL/ SETPPKL/ PEHKT/ DTN.0.2/ 12/ 2024 perihal

Penyampaian hasil terkini nilai IKLH Tahun 2024; merekomendasikan sebagai berikut :

■ **Peningkatan Kualitas Air:**

- a. Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air.
- b. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemaran.
- c. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik.
- e. Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air.
- f. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

■ **Peningkatan Kualitas Udara :**

- a. Agar menetapkan target IKU untuk 5 tahun dan dimasukkan kedalam RPJMD serta menyusun Perda tentang PPU. Agar dilakukan peningkatan kapasitas SDM staf melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teknis.
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran udara baik dari industri maupun transportasi.
- c. Melakukan pemantauan kualitas udara dan menambah jumlah lokasi titik sampling dengan penggunaan APBD.
- d. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam kegiatan PPU.
- e. Membuat program kegiatan inovasi lain untuk pengendalian pencemaran udara.

■ **Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan :**

- a. Perlu melengkapi isian data Indonesia Hijau dengan menyebutkan data di kolom isian.
- b. Perlu adanya kebijakan dan peraturan dalam implementasi kegiatan yang mendukung pengendalian kerusakan lahan.
- c. Perlu mempertahankan tutupan hutan melalui pengawasan dan intervensi kebijakan alih fungsi lahan.

Tabel 3.18 **Terget dan Capaian Nilai Komposit Pendukung pelaksanaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)**

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KET.
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,81	72,58	BAIK
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,38	55,00	SEDANG
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	81	93,11	SANGAT BAIK
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	67,25	64,79	SEDANG

■ **Masalah/kendala yang di hadapi**

- Representatif pengambilan sampel air untuk dilakukan pengujian masih terbatas pada satu badan sungai, belum dilakukan mencapai 50% jumlah sungai di Kabupaten Flores Timur.
- Belum optimal merespon untuk melakukan pemulihan terhadap badan sungai sampling.
- Perlu mempertahankan tutupan lahan baik dalam kawasan hutan atau luar kawasan hutan serta kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung melalui pengawasan dan intervensi kebijakan dalam peningkatan kualitas lahan.

■ **Rencana Aksi**

Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai dari tahap perencanaan dengan melakukan inventarisasi; pencegahan dengan melakukan kegiatan penyusunan kebijakan, pembinaan, penguatan kerja sama dengan stakeholder, monitoring dan evaluasi lingkungan; penanggulangan dengan membangun infrastruktur pengendalian pencemaran dan penanganan pencemaran, serta pelaksanaan pemulihan dilokasi-lokasi yang mengalami kerusakan lingkungan.

Tabel 3.19

Tujuan 3
Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas

Capaian Indikator Tujuan 3 “Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Indeks Pembangunan Manusia	65.00	65.4	66.29	101.36

1. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan tabel 3.19 nilai capaian persentase (%) adalah 101,36% dengan target 65,4 dan realisasi 66,29. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM Kabupaten Flores Timur dapat dikaji berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Adapun, masalah-masalah pada indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Flores Timur sebagai berikut;

■ Masalah/kendala :

Berikut beberapa masalah terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Flores Timur.

1. Kualitas pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses ke sarana pendidikan yang dapat membuat masyarakat tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Keterbatasan akses layanan kesehatan yang dapat membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang lebih memadai.
3. Keterbatasan akses sumber daya ekonomi yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil.

■ Solusi :

1. Pengembangan pendidikan yang dapat membuat masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Pengembangan kesehatan yang dapat membuat masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang lebih memadai.
3. Pengembangan sumber daya ekonomi sektor lain sehingga dapat membuat masyarakat memiliki sumber pendapatan yang stabil.

■ Rencana Aksi

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengembangkan kurikulum yang relevan dan meningkatkan kualitas guru.
2. Meningkatkan kerja sama dengan perusahaan dan industri untuk menciptakan lapangan kerja.
3. Mengembangkan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
4. Meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dengan mengembangkan program bantuan sosial dan ekonomi

Tabel 3.20

Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Pembangunan Manusia	64,93	65,79	66,29

Berdasarkan tabel 3.20 menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mengalami kenaikan.

Tabel 3.21

Sasaran Strategi 3.1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing SDM” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.1.1	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,04	8,36	8,06	96,41
3.1.2	Angka Harapan lama sekolah (Tahun)	12,95	13,96	12,96	92,84

3.1.1 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah, harapannya adalah semakin tinggi RLS maka semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani dan semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya.

Berdasarkan data capaian kinerja pada tabel 3.21 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 belum mencapai target yang

ditetapkan, realisasi sebesar 8,06 dengan persentase capaian 96,41%, dari capaian tersebut diatas diketahui bahwa rata-rata lama sekolah penduduk yang ada diwilayah Kabupaten Flores Timur adalah 8,06 Tahun atau penduduk diwilayah Kabupaten Flores Timur menjalani pendidikan sampai kelas 2 SMP. Capaian tahun ini naik 0,2% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 8,04.

■ **Masalah**

1. Faktor Kemiskinan Penduduk;
2. Beban Ketergantungan Penduduk;
3. Jarak Tempuh ke sekolah.

■ **Solusi**

Melakukan Pemanfaatan Dana BOSP melalui perencanaan berdasarkan Rapor Pendidikan dan dukungan Dana DAU-SG dalam percepatan pemenuhan SPM Pendidikan

■ **Rencana Aksi**

Melakukan Monitoring Dana BOSP melalui perencanaan berdasarkan Rapor Pendidikan dan dukungan Dana DAU-SG dalam percepatan pemenuhan SPM Pendidikan.

Tabel 3.22

Perbandingan realisasi Rata-rata lama sekolah
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Rata-rata lama sekolah	7,79	8,04	8,06

Berdasarkan data kinerja di atas dapat diketahui bahwa belum seluruh Indikator kinerja pada sasaran 1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mencapai target yang di rencanakan.

2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk Harapan lama Sekolah capaiannya adalah 12,96 Tahun dari target 13,96 tahun atau sebesar sebesar 96,35%. Dari capaian tersebut diatas diketahui bahwa harapan lama sekolah penduduk yang ada

diwilayah Kabupaten Flores Timur adalah 12,95 Tahun atau penduduk diwilayah Kabupaten Flores Timur diharapkan menamatkan Pendidikan sampai SMA (12 Tahun) dan kuliah selama 9 bulan. Capaian tahun ini naik 0,8% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 12,94.

■ **Masalah**

Faktor biaya Pendidikan menjadi salah satu kendala utama untuk meningkatkan HLS.

■ **Solusi**

Pemberian biaya Pendidikan salah satunya adalah mengupayakan peningkatan kuota PIP Kabupaten Flores Timur dan beasiswa kuliah.

■ **Rencana Aksi**

- 1. Meningkatkan akses ke sarana pendidikan, terutama daerah pedesaan di Kabupaten Flores Timur
- 2. Memprioritaskan pembangunan pendidikan di daerah pedesaan dan Indonesia Timur
- 3. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan angka kelulusan dan rata-rata nilai ujian

Perbandingan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2021 s.d 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Angka Harapan Lama Sekolah	12, 94	12,95	12,96

Berdasarkan Tabel 3.23 bahwa nilai realisasi dari tahun 2021 s/d 2023 mengalami peningkatan.

Tabel 3.24 Sasaran Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya daya saing SDM” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.2.1	Angka Harapan Hidup	65,50	65,90	66,21	100,47

3.2.1. Angka Harapan Hidup

Berdasarkan tabel 3.24 nilai capaian Angka Harapan Hidup (AHH) 100,47 dimana AHH di Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting. Berikut adalah penjelasan tentang AHH di Kabupaten Flores Timur:

■ Faktor yang mempengaruhi AHH

1. Kualitas pelayanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan AHH.
2. Akses ke pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau dapat meningkatkan AHH.
3. Perilaku hidup sehat, seperti makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dan tidak merokok, dapat meningkatkan AHH.
4. Faktor lingkungan, seperti kualitas udara, air, dan tanah, dapat mempengaruhi AHH.

■ Data AHH di Kabupaten Flores Timur

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Flores Timur, AHH di Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024 adalah sebesar 65,9.

■ Masalah/ kendala yang di hadapi

Berikut beberapa masalah yang terjadi terkait Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Flores Timur:

1. Keterbatasan akses ke pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman dan terpencil dapat membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang lebih memadai.
2. Kualitas pelayanan kesehatan yang rendah dapat membuat masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
3. Perilaku hidup tidak sehat, seperti merokok, minum alkohol, dan tidak melakukan olahraga secara teratur, dapat meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan AHH.
4. Faktor lingkungan yang tidak sehat, seperti polusi udara, air, dan tanah, dapat meningkatkan risiko penyakit dan menurunkan AHH.
5. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan sumber daya manusia, dapat membuat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan AHH.

■ Solusi

1. Meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di daerah pedalaman dan terpencil.
3. Meningkatkan perilaku hidup sehat, seperti melakukan olahraga secara teratur, tidak merokok, dan tidak minum alkohol.
4. Meningkatkan faktor lingkungan yang sehat, seperti mengurangi polusi udara, air, dan tanah..

■ Rencana Aksi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dengan mengembangkan program kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses.
3. Meningkatkan perilaku hidup sehat dengan mengembangkan program pendidikan kesehatan yang efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
4. Meningkatkan faktor lingkungan dengan mengembangkan program pengelolaan lingkungan yang efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Tabel 3.25

Perbandingan realisasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Angka Harapan Hidup	65,62	65,96	65,21

Pada tabel 3.25 menyatakan bahwa realisasi tahun 2022 s/d 2024 Tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.26

Sasaran Strategi 3.3
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.3.1	Angka Kelahiran Total (TFR) (%)	3,2	3	2.2	73.33

3.3.1. Angka Kelahiran Total (TFR) (%)

Berdasarkan tabel 3.26 nilai capaian Angka Kelahiran Total (TFR) adalah 73,33% dengan realisasi 2,2 dan target nya 3 Total Fertility Rate (TFR) adalah salah satu indikator yang digunakan dalam demografi untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama usia reproduktifnya. TFR sering digunakan untuk menganalisis tren pertumbuhan populasi dan potensi perubahan dalam struktur demografi suatu negara atau wilayah. TFR diukur dalam jumlah rata-rata anak per wanita dalam kelompok usia reproduktif (biasanya antara 15-49 tahun). Konsep TFR melibatkan asumsi bahwa seorang wanita akan mengikuti pola fertilitas yang teramati pada saat pengukuran dan akan hidup sepanjang usia reproduktifnya.

■ Beberapa poin penting tentang Total Fertility Rate (TFR):

1. TFR sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk mengukur efektivitas kebijakan keluarga berencana dan upaya pengendalian pertumbuhan populasi. Jika TFR berada di bawah angka 2,1, biasanya dianggap bahwa populasi akan mengalami penurunan alami dalam jangka panjang.
2. TFR juga membantu dalam memahami struktur demografi suatu populasi. Jika TFR tinggi, populasi cenderung memiliki proporsi besar anak-anak dan remaja, yang dapat memiliki dampak pada ekonomi dan layanan masyarakat.
3. TFR dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan wanita, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, status sosial ekonomi, budaya, agama, dan kebijakan pemerintah terkait keluarga berencana.
4. TFR yang tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, sementara TFR yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang lambat bahkan menurun.
5. TFR tidak statis; itu dapat berubah seiring waktu karena perubahan dalam norma sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. TFR yang semula tinggi dalam suatu negara bisa menurun secara signifikan karena perubahan dalam kebijakan atau perubahan budaya.
6. TFR adalah alat penting dalam analisis demografi, karena memberikan wawasan tentang tren pertumbuhan populasi dan implikasinya terhadap

kebijakan dan pembangunan. Meskipun TFR dapat memberikan informasi yang berharga, penting juga untuk memahami bahwa ini hanyalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi perubahan populasi dalam suatu negara.

- Permasalahan yang dihadapi terkait Angka Kelahiran Total (TFR) bahwa masih ditemukan wanita produktif yang melahirkan anak lebih dari 3 anak dengan jarak yang dekat.
- Rencana strategis peningkatan layanan reproduksi dan pengendalian kelahiran dengan meningkatkan kepesertaan KB.
- Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:
 1. Meningkatkan kemampuan SDM terkhususnya para penyuluh KB dilapangan.
 2. Meningkatkan konseling dan pembinaan terhadap Pasangan Usia Subur.

Tabel 3.27

Perbandingan realisasi Angka Kelahiran Total tahun 2023 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Angka Kelahiran Total	-	2,58	2,20

Pada tabel 3.27 menyatakan bahwa realisasi tahun 2022 s/d 2024 mengalami kenaikan

Tabel 3.28

Sasaran Strategi 3.4
Menurunnya Pengangguran

Capaian indikator sasaran “Menurunnya Pengangguran” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,81	3,31	3,73	112,69

3.4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka berarti tingkat pengangguran semakin kecil, hal ini terjadi ketika jumlah orang yang bekerja meningkat, sementara jumlah pengangguran menurun. Dari tabel diatas menggambarkan target untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka belum mencapai target.

■ Masalah/ kendala yang di hadapi

Pada tahun 2024, belum tercapainya target indikator menurunnya angka pengangguran terbuka karena target tahunan didasarkan pada target Rencana Strategis OPD setiap tahunnya. Dan juga kebutuhan anggaran untuk mencapai target kinerja OPD belum sepenuhnya maksimal dikarenakan keterbatasan kemampuan anggaran daerah Kabupaten Flores Timur sehingga kegiatan yang dilaksanakan dan mendukung capaian kinerja belum maksimal. Selain itu, kebanyakan perusahaan pencari kerja mencari pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan pada suatu bidang pekerjaan yang bersertifikasi, dan masih terdapat tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan yang maksimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan teknologi atau kurang menguasai suatu bidang kerja dan tidak memenuhi kualifikasi pendidikan.

■ Rencana Strategis

Strategi Dinas Tenaga Kerja dalam hal pengurangan angka pengangguran yaitu:

- Tersedianya anggaran dan Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang walaupun dalam keterbatasan mampu mendukung pencapaian kinerja khususnya kegiatan yang bersumber dari DAU Spesifik Grand yang menunjang tercapainya realisasi target tahun 2024.
- Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penempatan kerja yang kompeten di dalam dan luar negeri.
- Melakukan koordinasi antar lembaga-lembaga terkait seperti LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), Balai Latihan Kerja Komunitas, Balai Latihan Kerja Swasta dan Pemerintah serta adanya P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia)

■ Rencana Aksi

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kualitas Sumber Daya Manusia yang baik, karena akan menunjang kegiatan dalam instansi Dinas Tenaga Kerja.
2. Adanya sarana dan prasarana yang merupakan instrument yang sangat menunjang dan pendukung dalam kegiatan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

3. Perlu adanya upaya-upaya strategis guna memperhatikan kebijakan anggaran agar target kinerja program dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal.
4. Adanya upaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas bidang dalam mendukung peningkatan kinerja.
5. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.
6. Menyusun program magang dan pelatihan.
7. Melaksanakan kegiatan padat karya dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi penganggur kurang terdidik/terampil, terkena PHK, dan pengaruh musim.
8. Pengembangan informasi pasar kerja.

Tabel 3.29

**Perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2022 s.d 2024**

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Tingkat pengangguran terbuka	3,49	3,42	3.73

Perbandingan perjanjian kinerja antara tahun 2022, 2023 dan 2024 pada tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat karena belum maksimalnya kesediaan peralatan pelatihan dan juga masih dalam suasana covid-19 sehingga ada banyak pekerja yang di PHK.

Pada tahun 2023 terlihat bahwa tingkat capaian angka pengangguran terbuka menurun, hal ini dikarenakan terpenuhinya pencari kerja yang sudah terdidik dan terlatih terampil berdasarkan klaster kompetensi dan kesadaran masyarakat NTT untuk mencari kerja di luar dan dalam negeri melalui prosedur.

Sedangkan pada tahun 2024 terlihat bahwa target untuk menurunkan jumlah pengangguran terbuka belum mencapai target karena target tahunan didasarkan pada Rencana Strategis OPD tiap tahunnya. Terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat dari target 3,31 % menjadi 3,73%, naik sebanyak 0,42 % hal ini dikarenakan jumlah pencari kerja meningkat yang mana di tahun 2023 sebanyak 4.947 menjadi 5.783 di tahun 2024 (Data BPS). Kebanyakan perusahaan pencari kerja mencari pekerja dengan kualifikasi pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan pada suatu bidang pekerjaan yang bersertifikasi dan juga masih terdapat tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan yang maksimal dikarenakan keterbatasan pengetahuan teknologi atau kurang menguasai suatu bidang kerja dan tidak memiliki kualifikasi pendidikan, serta banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya program

tersebut karena kurang peduli terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

Tabel 3.30

Sasaran Strategi 3.5
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pengarusutamaan Gender” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.5.1	Indeks Pembangunan Gender	3.20	93.16	91.97	98.72

3.5.1. Indeks Pembangunan Gender (point)

Bedasarkan tabel 3.30 nilai capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (point) mencapai 98,72% dengan nilai target 93,16 dan realisasi 91,97. Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

■ Masalah

Permasalahan yang dihadapi terkait Indeks Pembangunan Gender adalah masih ditemukannya ketidaksertaan gender, diskriminasi. Sebagai contoh kekerasan terhadap perempuan baik fisik, psikis, ekonomi dan lain- lain.

■ Rencana Strategis

Rencana yaitu perencanaan anggaran yang responsif gender.

■ Rencana Aksi

- Membuat Perda terkait perlindungan perempuan korban kekerasan.
- Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang menangani kekerasan perempuan.

Tabel 3.30

Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Gender
Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Pembangunan Gender	-	92,08	91,97

Berdasarkan tabel 3.30 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 3.31

Sasaran Strategi 3.5
Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.5.1	Indeks Pembangunan Pemuda	-	53.99	54.33	100.63

3.5.1. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta mencerminkan capaian dari upaya pembangunan pemuda di suatu wilayah atau negara. IPP mengukur kemajuan pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi, memberikan gambaran komprehensif tentang sejauh mana pemuda telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan.

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2024 naik 0,34% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024. Capaian kinerja ini bergantung pada domain utama yaitu :

1. Pendidikan: Mengukur tingkat pendidikan pemuda, termasuk akses terhadap pendidikan, partisipasi dalam pendidikan, dan kualitas pendidikan.
2. Kesehatan dan Kesejahteraan: Mengukur status kesehatan pemuda, termasuk angka harapan hidup, angka kematian, dan prevalensi penyakit.
3. Lapangan dan Kesempatan Kerja: Mengukur partisipasi pemuda dalam angkatan kerja, tingkat pengangguran pemuda, dan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi pemuda.
4. Partisipasi dan Kepemimpinan: Mengukur partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan.
5. Gender dan Diskriminasi: Mengukur kesetaraan gender dalam pembangunan pemuda, serta tingkat diskriminasi yang dihadapi oleh pemuda berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, dan faktor lainnya.

Dari kelima domain di atas, dapat di simpulkan masalah yang dihadapi oleh indikator ini adalah :

■ Masalah

1. Domain pendidikan mencatat capaian paling tinggi (Indikator APK),
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ditempat kedua dipengaruhi oleh menurunnya Angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, dan persentase pemuda merokok
3. Domain Lapangan dan Kesempatan kerja menjadi yang terendah. Perilaku hidup bebas, perkembangan jaman dan pengaruh lingkungan menjadi faktor utama penghambat peningkatan kinerja ini.

■ Solusi

1. Melakukan kerjasama lintas sektor pendukung domain IPP, Sosialisasi dan Advokasi.
2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan wirausaha, kepemimpinan, dan keterampilan vokasional untuk meningkatkan kemampuan pemuda.
3. Pemberian beasiswa untuk pemuda yang ingin melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan.
4. Pengembangan program magang untuk memberikan pengalaman kerja kepada pemuda.

■ Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di sebuah kabupaten, beberapa rencana tindak lanjut yang baik dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program seperti pelatihan wirausaha, pelatihan kepemimpinan, dan pengembangan keterampilan vokasional.
2. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan pemuda di tingkat provinsi dan nasional. RAD harus memuat target yang jelas, indikator yang terukur, dan sumber daya yang memadai.
3. Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, seperti kegiatan sosial, kegiatan olahraga, dan kegiatan kepemimpinan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program yang menarik bagi pemuda.
4. Pengembangan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan pemuda. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan program-program kemitraan yang efektif.

5. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan pemuda untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif.

Tabel 3.32

Perbandingan realisasi Indeks Pembangunan Pemuda
Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	-	54,33	54,33

Berdasarkan tabel 3.32 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2022 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan.

Tabel 3.33

Sasaran Strategi 7
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi	48,44	58,17	56,47	97,08

1.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tabel 3.33 menyatakan capaian indikator 97,08 dengan target 58,17 dan realisasi 56,47. Predikat "Reformasi Birokrasi" di Kabupaten Flores Timur merujuk pada upaya pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dan peningkatan dalam sistem birokrasi pemerintahan. Reformasi birokrasi adalah suatu proses perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

■ Tujuan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Flores Timur adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan

■ Masalah / kendala yang di hadapi

Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur meliputi:

1. Masih rendahnya komitmen pengampu RB baik RB General maupun RB Tematik
2. Keterbatasan sumber daya dan anggaran.
3. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.
4. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi.
5. Resistensi dari aparatur pemerintahan dan masyarakat terhadap perubahan.

■ Solusi/ strategi

Strategi reformasi birokrasi di Kabupaten Flores Timur meliputi:

1. Meningkatkan rapat koordinasi pengampu RB General dan RB Tematik
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan sistem pelayanan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui pengembangan mekanisme partisipasi yang efektif..

■ Rencana Aksi

1. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi tim pengampu RB.
2. Mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan.
3. Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien.
4. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya
5. Mengembangkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
6. Mengembangkan sistem pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
7. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya

Tabel 3.34

Perbandingan realisasi Indeks Keluarga Sehat
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023
Indeks RB	48,97	44,48	56,47

Berdasarkan Tabel 3.34 Menyatakan bahwa nilai capaian kinerja dari tahun 2022 s/d tahun 2024 mengalami peningkatan

Tabel 3.35

Sasaran Strategi 4.1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.1.1	Indeks Kepuasan masyarakat (point)	81,18	85.86	84.12	97.97
4.1.2	Predikat Sakip (%)	52,00	59.12	60.10	101.66
4.1.3	Indeks SPBE	-	2.21	2.10	95.02

4.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada tabel 3.35 memiliki capaian nilai 97.97 dengan target 85.86 dan realisasinya 84.12. Dalam perhitungan nilai IKM di perlukan total dari nilai Persepsi Per Unsur dan Total Unsur Terisi dan dikali Nilai Penimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.36

IKM Unit Pelayanan x 25

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2.	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3.	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4.	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat baik

Berdasarkan tabel 3.36, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik” adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 62,51 (enam puluh dua koma lima puluh satu) atau memiliki predikat B ke atas.

Tabel 3.37

Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2022 s/d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kepuasan	80,52	82,86	83,80

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 83,80. Nilai IKM di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 4 (empat) Perangkat Daerah telah menyampaikan laporannya. Dari seluruh Perangkat Daerah yang telah melaporkan hasil SKM, belum dilakukan rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Hasil analisis data SKM menunjukkan bahwa unsur sarana dan prasarana merupakan unsur dengan nilai rendah pada semua unit penyelenggara pelayanan publik, diikuti oleh unsur perilaku pelaksana dan waktu penyelesaian.

■ **Masalah yang di hadapi**

1. Pengisian kuisioner telah dilakukan secara Online by android namun masyarakat banyak yang masih tidak memiliki *handphone* android.
2. OPD dan UPTD Puskesmas banyak yang tidak menyampaikan rencana aksi untuk hasil unsur yang memperoleh nilai terendah tahun sebelumnya.

■ **b. Solusi**

Harus melakukan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk meningkatkan unsur nilai terendah.

■ **c. Rencana Aksi**

Menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi terselenggaranya FKP

5.1.1. Nilai SAKIP

Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.38

Hasil penilaian evaluasi SAKIP di instansi pemerintah dapat dikategorikan sebagai berikut

No.	Nilai	Predikat	Interpretasi
1.	> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	A	Memuaskan
3.	> 70 – 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 – 70	B	Baik
5.	> 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	> 30 – 50	C	Kurang
7.	> 0 – 30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel 3.37, Instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja “Baik” adalah instansi pemerintah yang nilai total akuntabilitas kinerja di atas 60 (enam puluh) atau memiliki predikat B ke atas.

Tabel 3.39

Rincian hasil evaluasi Sakip tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	19,70	20,26
b. Pengukuran Kinerja	30	15,16	17,51
c. Pelaporan Kinerja	15	7,56	8,16
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,64	13,72
Nilai Hasil Evaluasi	100	53,06	60,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Pada tabel 3.39 perkembangan instansi pemerintah dengan akuntabilitas kinerja tahun 2024 telah mengalami peningkatan dari predikat **“Cukup (CC)”** menjadi **“Baik (BB)”**. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Flores Timur menjadi termotivasi untuk meningkatkan nilai SAKIP menjadi lebih baik lagi.

Tabel 3.40

Presentase Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2022 s/d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Predikat SAKIP	52,47	53,06	60,10

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan persentase instansi pemerintah yang memiliki Nilai Akuntabilitas Kinerja Baik (kategori “B”) antara lain:

1. Pimpinan instansi belum sepenuhnya terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP;
2. Instansi pemerintah masih dalam proses menyempurnakan SAKIP yang diterapkan dengan berpedoman pada peraturan baru, yaitu Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permen-PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Personel yang secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup untuk melakukan bimbingan teknis dan asistensi secara optimal;
4. Anggaran yang terbatas mengakibatkan tidak semua bimbingan teknis dan asistensi dapat dilaksanakan secara langsung bagi daerah yang memiliki kendala jaringan.
5. Para stakeholder belum bersinergi secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Flores Timur secara intensif mengikuti sosialisasi dan pendampingan atas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah bersama Kementerian PANRB.

■ Masalah yang di hadapi

1. Perencanaan kinerja
 - Penetapan target kinerja yang dimiliki pada level kabupaten dan PD belum sepenuhnya ditetapkan secara realistis dan logis, hal ini disebabkan masih terdapat beberapa target kinerja yang ditetapkan lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian target kinerja tahun lalu;
 - Pada sebagian Perangkat Daerah (PD) masih ditemukan penetapan indikator kinerja yang tidak relevan dan cukup untuk mengukur kondisi

kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak diketahui sejauh mana perwujudan kondisi kinerja sasaran strategis tersebut;

- Upaya penyusunan pohon kinerja belum sepenuhnya menerapkan kerangka berpikir logis, karena penjenjangan kinerja pada pohon kinerja masih dikaitkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan sehingga belum tercipta hubungan sebab akibat antar level kinerja pada pohon kinerja;
- Belum sepenuhnya aktivitas-aktivitas yang dimiliki PD menunjang pencapaian kinerja strategis yang ditetapkan, karena masih ditemukan aktivitas-aktivitas yang tidak relevan jika dikaitkan dengan pencapaian kinerja strategis PD.

2. Pengukuran Kinerja

- Meskipun telah terdapat perbaikan formulasi IKU, namun masih terdapat beberapa data pencapaian kinerja pada PD yang tidak andal, karena antara alat ukur dan penetapan target tidak relevan;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual belum memanfaatkan IT;
- Rencana aksi yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja. Hal ini disebabkan penetapan target sebagai dasar pengukuran kinerja belum secara berkala atau masih satu tahun sekali;
- Belum sepenuhnya pimpinan PD berkomitmen untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pengukuran pencapaian kinerja. Hal ini dapat dilihat belum adanya umpan balik yang diberikan pimpinan PD untuk pencapaian kinerja yang dimiliki.

3. Pelaporan Kinerja

- Informasi faktor keberhasilan atau kegagalan yang terdapat pada LPPD dan LAKIP beberapa PD masih bersifat umum dan cenderung sama sehingga kualitas faktor keberhasilan yang dituangkan belum secara spesifik menjelaskan hal-hal teknis apa saja yang menyebabkan kinerja itu terealisasi dengan baik atau tidak;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan strategi perencanaan kinerja tahun berikutnya, terutama pada capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target di tahun sebelumnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD sehingga belum mampu memberikan perbaikan yang signifikan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP setiap PD;
- Hasil evaluasi internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh PD sehingga perbaikan yang diharapkan belum optimal.

■ Solusi

- Melakukan reviu atas penetapan target yang dimiliki pada level kabupaten dan PD dengan memastikan target tahun ini penetapannya lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh tahun lalu sehingga target kinerja lebih realistis dan logis;
- Melakukan penetapan indikator kinerja yang dimiliki oleh sebagian PD agar lebih relevan dan cukup untuk mengukur kondisi kinerja sasaran strategis yang ditetapkan sehingga indikator kinerja dapat dijadikan alat ukur untuk mengetahui pencapaian kondisi kinerja sasaran strategis yang ditetapkan;
- Mereviu kembali pohon kinerja yang dimiliki agar lebih mengutamakan kerangka berpikir logis, khususnya terkait dengan penyusunan penjenjangan kinerja dengan mengutamakan hubungan sebab akibat antar level kinerja;
- Melakukan aktivitas-aktivitas yang dimiliki PD yang dapat menunjang pencapaian kinerja strategis yang ditetapkan sehingga tercipta perencanaan kinerja yang efektif dan efisien;
- Melakukan reviu kembali penetapan IKU pada beberapa PD, khususnya dalam menetapkan alat ukur dan penetapan target agar lebih relevan sehingga data pencapaian kinerja dapat diandalkan;
- Pemerintah Kabupaten Flores Timur melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan IT sehingga mempermudah pimpinan daerah atau PD untuk memantau pencapaian kinerja yang dimiliki dan pengumpulan data kinerja menjadi lebih berkualitas;
- Mengoptimalkan rencana aksi yang dimiliki untuk dijadikan dasar monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dengan memastikan penetapan target yang disusun secara berkala atau minimal triwulanan;

- Mendorong adanya komitmen dari seluruh pimpinan untuk terlibat pengambilan keputusan dalam pengukuran pencapaian kinerja dengan cara memberikan umpan balik untuk setiap pencapaian kinerja yang dimiliki;
- Meningkatkan kualitas informasi faktor keberhasilan atau kegagalan pada LAKIP diseluruh PD dengan menuangkan secara spesifik penjelasan teknis terkait faktor apa saja yang menyebabkan kinerja itu terealisasi dengan baik atau tidak;
- Memanfaatkan informasi yang tertuang dalam LPPD maupun LAKIP seluruh PD agar menjadi dasar dalam menetapkan perbaikan strategi perencanaan kinerja baik pada tahun depan maupun periode perencanaan jangka menengah berikutnya;
- Memastikan kembali laporan hasil evaluasi internal telah memberikan temuan dan rekomendasi yang bersifat spesifik dan tidak hanya pada pemenuhan dokumen saja, namun juga pada aspek kualitas dan pemanfaatan setiap komponen SAKIP sehingga setiap PD mampu melaksanakan rekomendasi yang disampaikan dengan baik dan mampu memberikan perbaikan yang signifikan;
- Mendorong seluruh PD agar menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal. Selain itu, tim evaluasi internal agar melakukan reviu atas tindak lanjut yang dilakukan oleh setiap PD sehingga kualitas tindak lanjut yang diberikan telah sesuai dengan rekomendasi yang dimaksud dalam laporan hasil evaluasi AKIP internal.

■ Rencana Aksi

- Melakukan koordinasi bersama seluruh OPD dalam tindak lanjut rekomendasi AKIP
- Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif bersama Badan Perencanaan, , Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024.
- Meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Flores Timur dari 60% menjadi 70% dalam waktu 1 tahun.

- Mengembangkan sistem informasi akuntabilitas terkait Evaluasi SAKIP internal dengan membuat Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui “*google spreadsheet*” dengan perhitungan pertriwulan.
- Melakukan evaluasi kinerja dan perencanaan internal untuk tahun berikutnya.



Gambar 3.1
Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 60,10 dengan kategori **B “Baik”**.

Tabel 3.41

Perbandingan realisasi Predikat SAKIP
tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Predikat SAKIP	52,47	53,06	60,10

Berdasarkan tabel 3.41 menyatakan bahwa nilai realisasi Predikat SAKIP dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami peningkatan.

5.1.2. Indeks SPBE

Pada tabel 3.42 nilai capaian indikator Indeks SPBE yaitu 95,02 dengan target 2.21 dan realisasinya 2,10. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah ukuran untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Flores Timur, dilakukan untuk menilai seberapa baik pemerintahan daerah tersebut dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.

■ **Masalah / kendala yang dihadapi**

Berikut beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh Kabupaten Flores Timur terkait dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik):

5. Keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Flores Timur yang memiliki luas wilayah yang cukup besar dan topografi yang beragam, sehingga memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi SPBE.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengalaman dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat menjadi hambatan dalam implementasi SPBE.
7. Kabupaten Flores Timur memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan dan mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya SPBE dan manfaatnya dapat menjadi hambatan dalam implementasi SPBE.
9. Ketergantungan pada teknologi dapat menjadi hambatan dalam implementasi SPBE, terutama jika terjadi gangguan pada sistem teknologi.
10. Kurangnya integrasi sistem antar instansi pemerintah dapat menjadi hambatan dalam implementasi SPBE.
11. Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

■ **Solusi**

Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik):

1. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Flores Timur.
2. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.
3. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SPBE dan manfaatnya melalui kampanye dan promosi.

5. Mengembangkan sistem yang terintegrasi antar instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
6. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
7. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan teknologi, untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam mengelola sistem pemerintahan elektronik.

■ Rencana Aksi

Berikut adalah rencana aksi untuk meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) di Kabupaten Flores Timur:

1. Pengembangan Infrastruktur TIK
 - Mengembangkan jaringan TIK yang memadai dan handal.
 - Mengembangkan sistem keamanan TIK yang efektif.
2. Pengembangan Aplikasi TIK
 - Mengembangkan aplikasi TIK untuk pelayanan publik.
 - Mengembangkan aplikasi TIK untuk pengelolaan sumber daya.
3. Pengembangan Kapasitas SDM
 - Melakukan pelatihan bagi pegawai dalam penggunaan TIK.

Tabel 3.42

Perbandingan realisasi Indeks SPBE
Tahun 2022 s.d 2024

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks SPBE	0	2,07	2,10

Berdasarkan tabel 3.42 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2022 s/d 2024 sedikit mengalami peningkatan yang tidak signifikan.

Tabel 3.43

Sasaran Strategi 4.2
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Capaian indikator sasaran “Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN” adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Sasaran	Data Awal	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.2.1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.	0	81,14	N/A	0,00
4.2.2	Opini BPK (Opini)	WDP	WDP	WDP	WTP

4.2.1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK.

Berdasarkan Tabel 3.40 nilai Capaian Indikator Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK yaitu 0,00% dengan nilai target 81,14 dan nilai realisasi N/A, pada indikator ini telah berjalan realisasi kegiatannya.

4.2.2. Opini BPK.

Capaian indikator Opini BPK mencapai 100% dengan target Opini WTP dan berdasarkan LKPD TA 2023 Kabupaten Flores Timur, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan opini WTP ini merupakan yang ketiga kalinya bagi Kabupaten Flores Timur. Berikut adalah Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2023.



Gambar 3.2
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2023.

Bertempat di Kupang, pada tanggal 21 Juni 2024 di kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. LHP LKPD tersebut diserahkan kepada Ketua DPRD

Kabupaten Flores Timur, Robertus Rebon Kereta dan Pj. Bupati Flores Timur, Sulastri H. I Rasyid.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dimana standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”** atau **“WTP”**

Kabupaten Flores Timur, telah mempertahankan opini WTP tiga Tahun berturut-turut. Walaupun telah memperoleh WTP, masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK antara lain:

1. Realisasi belanja lembur tidak sesuai ketentuan; dan
2. Pencatatan aset tetap belum sepenuhnya tertib

Tabel 3.44		Perbandingan Opini BPK Tahun 2022 s.d 2024		
Indikator Sasaran		Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Opini BPK		WTP	WTP	WTP

Berdasarkan tabel 3.44 menyatakan bahwa nilai realisasi dari tahun 2022 s/d 2024 memiliki status WTP selama tiga tahun berturut-turut.

3.2 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kab.Flores Timur

Akuntabilitas keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aspek keuangan yang digunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPD maupun Indikator Kinerja Utama. Gambaran Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran per 31 Desember Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45		Anggaran dan Realisasi APBD Kab. Flores Timur TA. 2024		
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1,293,111,583,277.41	1,289,484,174,191.48	99.72
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55,299,582,639.00	55,220,726,033.89	99.86

4.1.01	Pajak Daerah	17,460,890,000.00	15,763,150,851.41	90.28
4.1.02	Retribusi Daerah	5,728,914,924.00	3,623,002,420.00	63.24
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,845,122,715.00	2,013,815,603.00	52.37
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	28,264,655,000.00	33,820,757,159.48	119.66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,222,927,550,127.41	1,221,629,776,567.00	99.89
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,183,856,090,800.41	1,186,584,941,658.00	100.23
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39,071,459,327.00	35,044,834,909.00	89.69
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14,884,450,511.00	12,633,671,590.59	84.88
4.3.01	Pendapatan Hibah	72,863,835.00	10,862,851.59	14.91
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14,811,586,676.00	12,622,808,739.00	85.22
5	BELANJA DAERAH	1,382,933,853,541.00	1,306,406,367,284.00	94.47
5.1	BELANJA OPERASI	916,107,571,223.00	850,427,649,170.00	92.83
5.1.01	Belanja Pegawai	537,461,711,125.00	511,746,215,171.00	95.22
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318,389,625,369.00	279,301,145,611.00	87.72
5.1.04	Belanja Subsidi	47,320,000.00	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	59,994,414,729.00	59,165,926,097.00	98.62
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	214,500,000.00	214,362,291.00	99.94
5.2	BELANJA MODAL	203,897,389,578.00	189,895,700,799.00	93.13
5.2.01	Belanja Modal Tanah	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,846,577,597.00	48,525,952,256.00	95.44
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,934,826,490.00	102,571,655,870.00	90.82
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37,875,179,611.00	36,585,207,223.00	96.59
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,150,805,880.00	2,122,885,450.00	98.70
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5,534,950,980.00	2,423,055,403.00	43.78
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5,534,950,980.00	2,423,055,403.00	43.78
5.4	BELANJA TRANSFER	257,393,941,760.00	263,659,961,912.00	102.43
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,578,000,000.00	1,397,184,152.00	88.54

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255,815,941,760.00	262,262,777,760.00	102.52
	SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	(89,822,270,263.59)	(16,922,193,092.52)	18.84
6	PEMBIAYAAN DAERAH	92,822,270,263.59	92,730,262,263.59	99.90
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	91,322,270,263.59	91,230,262,263.59	99.90
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	91,222,270,263.59	91,222,270,263.59	100.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100,000,000.00	7,992,000.00	7.99
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	89,822,270,263.59	89,730,262,263.59	99.90
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAN	-	72,808,069,171.07	-

Sumber : Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. Flores Timur Tahun 2023 (Sebelum Audit BPK RI)

Berdasarkan Tabel 3.45 Secara umum pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. **1,293,111,583,277.41-** dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1,289,484,174,191.48** atau **99.72 %**. Belanja Daerah dianggarkan target sebesar Rp. **1,382,933,853,541.00** - dan mencapai realisasi sebesar Rp. **1,306,406,367,284.00** - atau **94,47%**. Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. **92,822,270,263.59** dengan realisasi anggran Rp. **91,230,262,263.59** atau **99,90%**, sisa lebih pembiayaan anggaran ialah (0) dan realisasi nya Rp.**72,808,069,171.07** atau **0,00%**.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian PANRB Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Kementerian PANRB Tahun 2022 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Peraturan Bupati nomor 8 tahun 2024.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan dunia usaha. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 dapat dinyatakan **“Berhasil”**, karena realisasi sebanyak 22 indikator berhasil dari 23 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 8 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 indikator;
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 12 indikator; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator.

Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan nilai capaian 98,58%. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan kebijakan terkait pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi, kordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

**PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1.	Terwujudnya Daya Saing Daerah						
1		Pertumbuhan Ekonomi	%	4.61	2.69	58.35	CUKUP BAIK
1.1	Terwujudnya daya saing Ekonomi	1.1.1 Pertumbuhan PDRB	%	4.61	2.69	58.35	CUKUP BAIK
		1.1.2 Laju Inflasi Daerah	Poin	0.45	2.65	16.98	KURANG BAIK
		1.1.3 Indeks Desa Membangun	Poin	100.00	100.00	100.00	BAIK SEKALI
		1.1.4 Nilai Investasi Daerah	Rp	Rp 34,323,337,329.00	Rp 79,994,651,629.00	233.06	BAIK SEKALI
1.2	Terwujudnya daya saing Infrastruktur	1.2.1 Indeks Infrastruktur	Poin	28.87	72.96	252.72	BAIK SEKALI
2.	Terwujudnya Pembangunan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan						
2		Indeks Gini	Poin	0.312	0.287	91.99	BAIK SEKALI
2.1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat	2.1.1 Tingkat Kemiskinan	%	9.41	11.25	83.64	BAIK
2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)	Poin	69.81	72.58	103.97	BAIK SEKALI
3.	Terwujudnya Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas						
3		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	65.4	66.29	101.36	BAIK SEKALI
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	3.1.1 Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.36	8.06	96.41	BAIK SEKALI
		3.1.2 Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.96	12.96	92.84	BAIK SEKALI
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.2.1 Angka Harapan Hidup	%	65.9	66.21	100.47	BAIK SEKALI
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan KB	3.3.1 Angka Kelahiran Total (TFR)	%	3	2.2	73.33	CUKUP BAIK
	Menurunnya Pengangguran	3.4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.31	3.73	112.69	BAIK SEKALI
	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	3.5.1 Indeks Pembangunan Gender (Poin)	Poin	93.16	91.97	98.72	BAIK SEKALI
	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah	3.6.1 Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	53.99	54.33	100.63	BAIK SEKALI
4.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
4		4 Indeks RB	Poin	58.17	56.47	97.08	BAIK SEKALI
4.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	85.86	84.12	97.97	BAIK SEKALI
		4.1.2 Nilai SAKIP	Nilai	59.12	60.1	101.66	BAIK SEKALI
		4.1.3 Indeks SPBE	Poin	2.21	2.1	95.02	BAIK SEKALI
4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	4.2.1 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) KPK	Poin	91.14	N/A	0.00	KURANG BAIK
		4.2.2 Opini BPK	Opini	WDP	WTP	100.00	BAIK SEKALI



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 88 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan merupakan Prosedur Kerja dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area perubahan ketatalaksanaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 28 Desember 2018

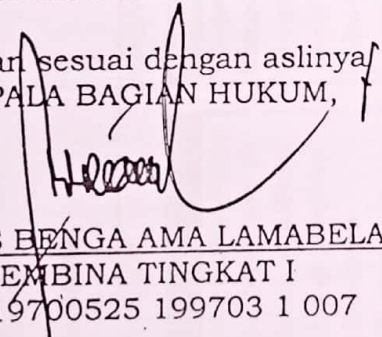
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700525 199703 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

: Desember 2017

Tanggal Revisi

: November 2018

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

BUPATI FLORES TIMUR

Nama SOP

Penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kabupaten 11 Nomor 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur
4. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

Peringatan

1. Pelaporan LKIP memiliki batas waktu yang wajib untuk diperhatikan agar tidak sampai terjadi keterlambatan dalam pengiriman LKIP ke Provinsi, Kemenpan dan RB, Kemendagri dan Bappenas

Kualifikasi Pelaksana

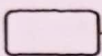
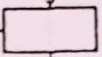
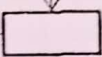
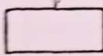
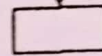
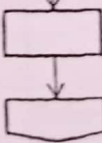
1. Sarjana Ilmu Pemerintahan/ Administrasi Negara/ Hukum
2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi
3. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
5. Memiliki tingkat ketelitian yang baik
6. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan

Peralatan/ Perlengkapan

Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Peraturan Perundangan-undangan terkait, Lembar Kerja/ Rencana Kerja

Pencatatan & Pendataan

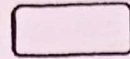
1. Disimpan dalam bentuk file softcopy dan hardcopy
2. Pada proses penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur, data agar dapat diterima dan dihimpun tepat waktu oleh Bagian Organisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bagian Organisasi	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Tim Sekretariat	Tim Penyusun LAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur					SK Bupati	15 menit	SK Bupati	Pembentukan Tim dengan SK Bupati
2	Mengonsep surat untuk dikirim kepada SKPD dalam rangka permintaan data kinerja dan Laporan Kinerja SKPD					Konsep Surat Keluar	10 menit	Konsep Surat Keluar	Surat dikonsep Kasubag
3	Mengoreksi surat untuk yang dikonsep Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi					Konsep Surat Keluar	5 menit	Konsep Surat Keluar	Surat telah dikoreksi Kabag
4	Mengetik surat, mengagendakan dan mendistribusikan surat kepada SKPD dan Tim Penyusun dalam rangka permintaan LKIP SKPD serta Rapat awal penyusunan LKIP					Surat Keluar	30 menit	Surat Keluar	Surat siap didistribusi ke SKPD dan Tim Penyusun
5	Memberi petunjuk penyusunan LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Kasubag Ketatalaksanaan dan Kinerja dan Staf Bagian Organisasi					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	15 Menit	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
6	Memberikan pelayanan kepada SKPD terkait konsultasi penyusunan Laporan Kinerja SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten
7	Menerima dan menghimpun dokumen LKIP dari semua SKPD					Petunjuk teknis penyusunan LKIP	1 minggu	Petunjuk teknis penyusunan LKIP	Persiapan penyusunan LKIP Kabupaten

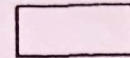
8	Menyusun draf dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Flores Timur berdasarkan data Laporan Kinerja SKPD				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyusunan Draf awal LKIP Kabupaten Flores Timur
9	Mengoreksi draf awal dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya dibahas dan disempurnakan bersama TIM Penyusun LKIP Kabupaten Flores Timur				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah dikoreksi
10	Melaksanakan proses penyempurnaan dan perbaikan atas draf LKIP antara lain: Pembahasan terkait finalisasi penyusunan dan rencana kerja TIM, Menganalisa RPJMD dan RENSTRA SKPD, Menyempurnakan draf awal LKIP				Laporan Kinerja SKPD, Perjanjian Kinerja, RENSTRA SKPD, RPJMD	1 Minggu	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur	Draf Dokumen LKIP Kab. Flores Timur yang sudah diperbaiki dan disempurnakan
11	Mengirim dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur kepada Inspektorat Kabupaten untuk direview				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur siap direview
12	Melakukan perbaikan/finalisasi dokumen LKIP sesuai hasil review Inspektorat Kabupaten Flores Timur				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	1 Minggu	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Finalisasi Dokumen LKIP Kab Flores Timur
13	Mengetik surat pengantar penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur di tingkat Provinsi dan Pusat setelah disetujui dan ditandatangani oleh Bupati Flores Timur				Surat Pengantar Penyampaian LKIP	15 Menit	Surat Pengantar Penyampaian LKIP	Surat Pengantar Penyampaian LKIP di tingkat Provinsi dan Kementerian
14	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur kepada Gubernur NTT melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	4 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Provinsi
15	Penyampaian LKIP Kabupaten Flores Timur ke Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas RI di Jakarta				Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	5 Hari	Dokumen LKIP Kabupaten Flores Timur	Penyampaian Dokumen LKIP di Pusat

KETERANGAN SIMBOL FLOWCHARTS:

1. Simbol Kapsul



2. Simbol Kotak



3. Simbol Belah Ketupat



4. Simbol Segilima



5. Simbol Anak Panah



Kegiatan mulai dan berakhir

Proses atau kegiatan eksekutif

Kegiatan pengambilan keputusan

Pindah Halaman

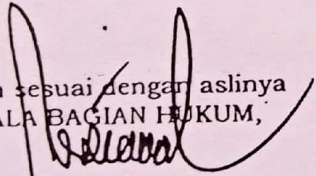
Alur Proses

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ADRIANUS BENGA AMA LAMABELAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 19700525 199703 1 007